



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

TESIS



**WINDA NOPITA
0821221019**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia)

Oleh :

WINDA NOPITA

0821221019

Dibawah Bimbingan
(Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak dan Suhandi, SE, M.Si, Ak)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan dan kepemilikan saham publik. Sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan *corporate social responsibility*. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini mengambil 30 sampel yang terdiri dari 2 sampel perusahaan pertambangan dan 28 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006-2008. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu analisis regresi linier berganda yaitu uji R^2 , uji t dan uji F. Uji R^2 digunakan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ditemukan bahwa variabel ukuran perusahaan, *leverage*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung dan signifikansi dari masing-masing variabel tersebut (0,002; 0,018; 0,026; 0,029; 0,000 < 0,05), sedangkan variabel *profitabilitas* dan kepemilikan saham publik menurut penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (0,508; 0,503 > 0,05). Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan dan kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05

Keywords: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Profitabilitas*, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajemen, Umur Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul:

**" PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)"**

Adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 07 September 2010
Yang membuat pernyataan

Winda Nopita



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 11 Nopember 1986 di Padang, sebagai anak kedua dari Papa H. Wahardi Wahab, SE (Alm) dan Mama Hj. Nurhaslina, SE, MM, serta memiliki seorang kakak Widia Apriyanti, S.STP, MM dan seorang Adik Weni Mailita, Amd, Kep. Penulis menamatkan SD pada tahun 1998, SMP tahun 2001 dan SMA pada tahun 2004. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta tahun 2008 dan gelar Akuntan pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2010.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Sains Akuntansi.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak dan Suhandi, SE, M.Si, Ak sebagai Komisi Pembimbing I dan II yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal hingga selesainya penelitian dan penulisan tesis ini.
2. Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Seluruh Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Magister Sains Akuntansi ini.

5. Kedua orang tua tercinta, (Alm) H. Wahardi Wahab, SE (Papa) dan Hj. Nurhaslina, SE, MM (Mama). Terima kasih untuk semua kasih sayang, do'a, kesabaran dan pengertiannya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Program Studi Profesi Akuntansi (kak che2, buk yulia dan buk linda) yang semangat yaa... mdh2an secepatnya dapat menyelesaikan studinya, Akuntansi Pemerintahan angkatan 2008 (terutama buat buk rini, bang anda, buk nia, kak uut dan kak siska) yang telah banyak membantu dalam penelitian, diskusi dan penyelesaian tesis ini dan angkatan 2009 pasca (terutama buat neva, kak reren, citra, bang adi, laila...yang semangat yaa dalam menyusun tesisnya), neva thx yaa atas bantuannya dalam diskusi dan penyelesaian tesis ini, mdh2 neva jg bs cpt2 menyelesaikan studinya,...amin.

Semoga bantuan dan kebajikan yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari ALLAH SWT, Amin. Akhir kata penulis mengharapkan tesis ini bermanfaat bagi penulis, dan para pembaca dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.

Padang, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Penelitian	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar	13
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
2.1.2 Pelaporan Informasi Sosial dan Kebijakan Akuntansi di Indonesia	15
2.1.3 Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	19
2.1.4 Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	21

2.1.5 Dimensi-dimensi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	26
2.1.6 Karakteristik Perusahaan (<i>Company-Characteristics</i>) dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan	30
2.1.6.1 Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>)	32
2.1.6.2 <i>Leverage</i>	33
2.1.6.3 <i>Profitabilitas</i>	34
2.1.6.4 Ukuran Dewan Komisaris	35
2.1.6.5 Kepemilikan Manajemen	37
2.1.6.6 Umur Perusahaan	37
2.1.6.7 Kepemilikan Saham Publik	38
2.2 Review Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Berpikir	43
2.4 Hipotesis	44

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	45
3.2 Variabel Penelitian Dan Pengukuran	46
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	52
3.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	52
3.5 Metode Analisis Data	53

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sampel	60
4.2 Statistik Deskriptif.....	62
4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	64
4.3.1 Uji Normalitas Data	64
4.3.2 Uji Multikolinearitas	65
4.3.3 Uji Autokorelasi	66
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	67
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	68
4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
4.4.2 Hasil Uji F	70
4.4.3 Hasil Uji t	70
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	72

IV KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI PENELITIAN

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Keterbatasan Penelitian	80
5.3 Implikasi Penelitian.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1	Definisi dan Operasionalisasi Variabel penelitian	50
Tabel 4.1	Daftar Perusahaan Sampel.....	60
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Normalitas	64
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	66
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Autokorelasi.....	67
Tabel 4.6	Hasil Uji R^2	69
Tabel 4.7	Hasil Uji F	70
Tabel 4.8	Hasil Uji t	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran43

Gambar 4.1: Hasil Pengujian Heteroskedastisitas68



DAFTAR LAMPIRAN

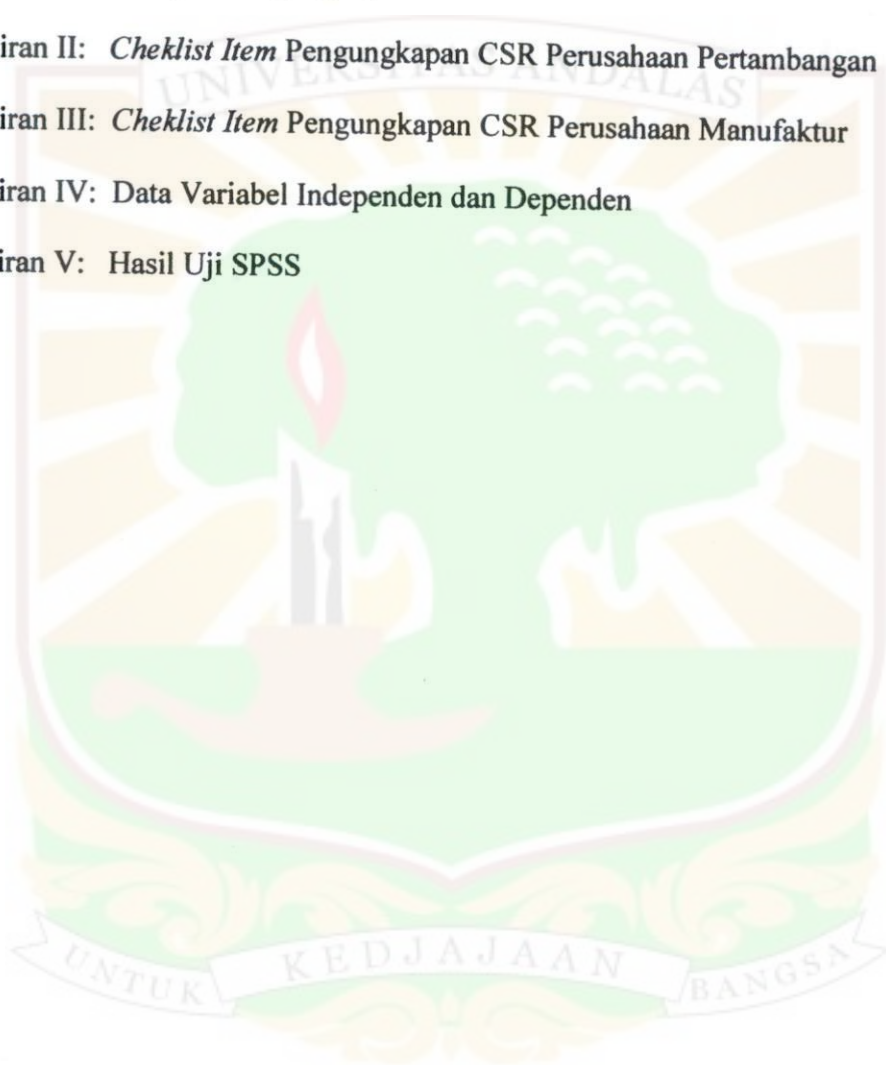
Lampiran I: Kategori Pengungkapan CSR

Lampiran II: *Cheklis Item* Pengungkapan CSR Perusahaan Pertambangan

Lampiran III: *Cheklis Item* Pengungkapan CSR Perusahaan Manufaktur

Lampiran IV: Data Variabel Independen dan Dependen

Lampiran V: Hasil Uji SPSS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini *corporate social responsibility* telah menjadi isu yang sangat penting bagi banyak perusahaan, baik yang beroperasi secara nasional maupun internasional. Perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility* dikatakan telah memenuhi *triple bottom line*: sosial, lingkungan dan ekonomi (Dawkins, 2004). Program *corporate social responsibility* dianggap memberikan keuntungan kepada masyarakat, lingkungan dan tetap memenuhi tujuan finansial perusahaan.

Penerapan *corporate social responsibility* di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya.

Intervensi manusia pada keseimbangan alam dan sosial yang terlalu jauh sehingga membahayakan manusia dan lingkungan merupakan sesuatu yang mendorong timbulnya tuntutan terhadap tanggung jawab sosial (Sudibyo, 1990). Selain tuntutan masyarakat yang merasakan dampak negatif modernisasi, tekanan dari pemerintah juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Tekanan pemerintah ini diwujudkan dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Melalui SK Menteri Perindustrian No. 146/SK/1985 pemerintah

mewajibkan adanya pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan, serta Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 mengatur wajib pengolahan limbah. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu berdasarkan PP No. 51/1993 pemerintah juga membentuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang mengharuskan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek. Selain itu perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab juga telah diatur pemerintah melalui UU No. 7 tahun 1996. Terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007, menandai babak baru pengaturan *corporate social responsibility* di negeri ini. Keempat ayat dalam pasal 74 Undang-Undang tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan dibidang sumber daya alam untuk melaksanakan *corporate social responsibility*. Substansi dalam ketentuan pasal tersebut mengandung makna, mewajibkan *corporate social responsibility* mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran *corporate social responsibility*, dan kewajiban untuk melaporkannya. Dengan ketentuan tersebut maka perusahaan tidak hanya wajib melaksanakan program *corporate social responsibility* tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengungkapkan program CSR-nya kepada seluruh pemangku kepentingannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendriksen (1994) terhadap survey 200 lembaga investor besar yang berasal dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan yang mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang sangat penting yang mempengaruhi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat 10 faktor yang

mempengaruhi keputusan investor dalam pengambilan keputusan investasi tersebut, dimana faktor pengungkapan sosial menempati posisi paling tinggi yang mempengaruhi investor dalam melakukan investasi yaitu sebesar 71 %.

Namun pengakomodasian unsur tanggungjawab sosial belum dijalankan oleh perusahaan dengan baik dan wajar dalam proses penilaian dampak sosial maupun dalam pelaporan. Ini dibuktikan dengan begitu banyak timbul konflik dan masalah pada industrial seperti demonstrasi dan protes yang menyiratkan ketidakpuasan. Berbagai elemen masyarakat disekitar lokasi pabrik merasa sangat terganggu akibat limbah atau polusi yang timbul sehingga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Para buruh yang sering sekali melakukan demo dan mogok kerja akibat kebijakan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan yang diterapkan perusahaan tidak mencerminkan rasa keadilan. Hubungan yang tidak selalu harmonis antara dunia usaha dengan konsumennya juga sering terjadi. Berbagai kasus, seperti biskuit beracun, makanan yang mengandung lemak babi, minuman dengan bahan pengawet yang berbahaya, bahkan pencemaran lingkungan yang akhir-akhir ini sering terjadi menunjukkan ketidakharmonisan hubungan tersebut. Menurut Mirfazil dan Nurdiono (2007), dampak sosial perusahaan tergantung pada jenis atau karakteristik operasi perusahaan. Karakteristik operasi perusahaan yang menghasilkan dampak sosial yang tinggi akan menuntut pemenuhan tanggungjawab sosial yang tinggi pula. Pelaksanaan tanggungjawab sosial akan disosialisasikan kepada publik melalui pengungkapan sosial dalam laporan keuangan tahunan. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat harus diungkapkan berupa laporan tanggungjawab sosial yang ternyata bisa berdampak terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri.

Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak lepas dari konflik-konflik sosial. Faktanya memang kecenderungan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat rendah, tetapi apabila perusahaan merasa membuat masalah dengan lingkungannya bahkan hingga terjadi konflik yang cukup besar, mereka mulai menyadari akan berdampak sendiri pada kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini terbukti dari keterlibatan perusahaan baik langsung maupun melalui jalur pemerintah atau badan-badan sosial dalam mengatasi dan memperbaiki atau membantu sarana dan kegiatan sosial, seperti: mensponsori berbagai kegiatan, pembersihan polusi dan air limbah, membantu korban bencana alam, mendirikan sarana pendidikan dan kesehatan, pemberian beasiswa dan mengutamakan keselamatan tenaga kerja. Selama ini pelaksanaan *corporate social responsibility* di Indonesia hanyalah merupakan sebuah tindakan sukarela dari perusahaan. Artinya, CSR sangat tergantung dari komitmen dan norma etika perusahaan untuk turut memikirkan kondisi sosial sekitarnya. Sehingga wacana CSR tidak pernah menjadi prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Padahal, tanggungjawab atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya akan menghasilkan kinerja bisnis yang baik.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama mengenai *corporate social responsibility* terhadap lingkungan. Akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya (Anggraini, 2006). Sementara itu, perkembangan CSR di luar negeri sudah sangat populer. Bahkan di beberapa negara CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja

sebuah perusahaan dengan dicantumkan informasi CSR di dalam catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Hill dkk (2007), CSR sudah selayaknya dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan menyelaraskan program CSR perusahaan tersebut dengan produk dan *image* perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, perusahaan rokok bisa melakukan program kemitraan dengan para petani tembakau, perusahaan produsen susu bisa melakukan program kerjasama dengan para peternak sapi setempat dan sebagainya.

Menurut Hackston dan Milne dalam Sembiring (2005), walaupun fenomena pengungkapan tanggungjawab sosial telah muncul lebih dari dua dekade, penelitian tentang praktik pengungkapan tanggung jawab sosial sepertinya hanya terpusat di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Penelitian praktik pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia antara lain Utomo (2000), Marwata (2001), Maksum dan Kholis (2003), Sembiring (2003), Anggraini (2006), Mirfazil dan Nurdiono (2007), dan sebagainya.

Berbagai penelitian yang terkait dengan *corporate social responsibility* menunjukkan keanekaragaman hasil. Sembiring (2005) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kelly (1981), Trotman dan Bradley (1981), Pang (1982), Belkaoui dan Karpik (1989), Patten (1991), Hackston dan Milne (1996), Adams dkk (1998), dan Gray dkk (2001) menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggungjawab sosial, sedangkan Singh dan Ahuja (1983) tidak menemukan hubungan kedua variabel tersebut. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989), keanekaragaman hasil tersebut sebagian disebabkan

model yang dikembangkan merupakan model yang sangat sederhana dan pengukuran yang digunakan juga tidak konsisten. Dalam penelitian Sembiring (2005) dan Sembiring (2003) menemukan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap *corporate social responsibility*, tetapi hasil penelitian Anggraini (2006) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Hubungan antara *leverage* dan pengungkapan tanggungjawab sosial juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sembiring (2005) menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989) serta Cormier dan Magnan (1999) menemukan hubungan yang negatif signifikan antara kedua variabel tersebut, sedangkan Robert (1992) menemukan hubungan yang positif. Dalam penelitian Sembiring (2005) dan Anggraini (2006) tidak menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility*, sedangkan Sembiring (2003) menemukan pengaruh yang negatif signifikan.

Hubungan antara *profitabilitas* dengan *corporate social responsibility* ditemukan berbagai hasil yang beragam. Sembiring (2005) menyatakan bahwa Freedman dan Ulmann (1986), Belkaoui dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996) menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut, Gray dkk (2001) menemukan hubungan yang bervariasi setiap tahun, sedangkan Bowman dan Haire (1976) serta Preston (1978) menemukan hubungan yang signifikan. Penelitian Sembiring (2005), Anggraini (2006) dan Sembiring (2003) menemukan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial.

Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Collier dan Gregory (1999) dalam Nofandrilla (2008) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan *corporate social responsibility*, maka tekanan terhadap manajemen yang akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Beasley (2000) dan Arifin (2002) dalam Sembiring (2005), serta Sembiring (2003).

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara umur perusahaan dan pengungkapan tanggungjawab sosial didukung oleh Ansah (2000), sedangkan Sembiring (2003) dan Marwata (2001) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian Sembiring (2003) menemukan bahwa persentase kepemilikan publik mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *corporate social responsibility*, sedangkan Marwata (2001) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel pada perusahaan pertambangan dan manufaktur karena perusahaan ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Dalam proses produksinya perusahaan pertambangan dan manufaktur akan menghasilkan limbah produksi dan hal ini berhubungan erat dengan masalah pencemaran lingkungan. Proses produksi yang dilakukan perusahaan pertambangan dan manufaktur juga mengharuskan mereka untuk memiliki tenaga kerja bagian produksi dan ini erat kaitannya dengan masalah keselamatan kerja. Selain itu perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk kepada konsumen sehingga isu keselamatan dan keamanan produk menjadi penting untuk diungkapkan

kepada masyarakat. Hal-hal inilah yang membedakan perusahaan pertambangan dan manufaktur dari perusahaan lainnya misalnya perbankan dan hal ini menjadi alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian tentang pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan dan manufaktur.

Berbagai hasil penelitian mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* sangat beragam, hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut agar diperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap. Dari keseluruhan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sembiring (2005). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian Sembiring (2005), antara lain:

1. Sampel yang diteliti oleh Sembiring (2005) menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkhususkan sampel pada perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di BEI saja. Pengkhususan sampel dapat menghindari hasil penelitian yang bias, dikarenakan perbedaan karakteristik perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian yang digunakan oleh Sembiring (2005), yaitu tahun 2002. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan periode penelitian yang terbaru yaitu tahun 2006-2008.

3. Sembiring (2005) menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai ukuran untuk *size* perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penjualan bersih sebagai alat ukur.
4. Sembiring (2005) menggunakan *earning per share* sebagai ukuran profitabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan *Net profit margin* sebagai alat ukur.
5. Selain itu, peneliti juga menambahkan beberapa variabel yang dapat mendukung penelitian ini, antara lain:
 - a. Variabel umur (*age*) dihitung dengan menggunakan ukuran sejak perusahaan melakukan penawaran saham perdana.
 - b. Variabel kepemilikan perusahaan dengan memasukkan besarnya persentase kepemilikan manajemen dan persentase kepemilikan publik masing-masing perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
5. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
6. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
7. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
8. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan, dan kepemilikan saham publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Mengetahui apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Mengetahui apakah *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

5. Mengetahui apakah kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
6. Mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
7. Mengetahui apakah kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
8. Mengetahui apakah ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan, dan kepemilikan saham publik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi penulis dan pembaca diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perkembangan akuntansi sosial, pertanggungjawaban sosial, serta pengungkapannya.
2. Bagi emiten diharapkan dapat memberikan masukan dan saran mengenai pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial serta pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan.
3. Bagi investor diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak hanya terpaku pada ukuran-ukuran moneter.

4. Bagi masyarakat dan pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi seberapa besar perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas sosialnya dan peduli pada lingkungan sosialnya.
5. Bagi regulator dalam hal ini IAI, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan apakah pengungkapan informasi sosial masih dapat dikategorikan sebagai pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) atau sudah harus diubah menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).
6. Bagi para peneliti di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan membatasi pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan yang dilakukan perusahaan pertambangan dan manufaktur tanpa melihat detail kualitas pengungkapan. Perusahaan sampel adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2008.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pada saat pemegang saham menunjuk manajer atau *agent* sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, maka pada saat itulah hubungan keagenan muncul.

Teori agensi yang berkembang mulai dari Jensen dan Meckling (1976) mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut sebagai *agent*. Ketidakmampuan atau keengganan manajemen untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut masalah keagenan (*agency problem*).

Menurut Jensen (1986), *agency problem* timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik kepentingan mendasari adanya biaya keagenan, dengan asumsi rasionalitas ekonomi dimana orang akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum pemenuhan kepentingan orang lain. Demikian juga halnya dalam hubungan prinsipal dan agen. Prinsipal termotivasi

mengadakan kontrak untuk menyejahterahkan dirinya dengan *profitabilitas* yang selalu meningkat, sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya.

Dalam kontrak antara manajer dan para pemegang saham maka manajer dilihat sebagai agen dan para pemegang saham dilihat sebagai prinsipal. Agen sebagai pengelola kekayaan perusahaan, menyusun laporan keuangan sebagai sarana akuntabilitas agen kepada prinsipal. Sebagai wujud pertanggungjawaban, agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, dalam hal ini adalah pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas.

Teori agensi menjelaskan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan berdasarkan keuntungan potensial dari pengungkapan yang meningkat dengan biaya agensi (Hossain et al., 1995). Biaya agensi dapat meningkat karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham, manajer dan kreditur. Meningkatnya pengungkapan akan mengurangi biaya agensi dan kesenjangan informasi (Marston, 2003).

Berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang *listing* di bursa saham, mengungkapkan informasi keuangan pada *website* mereka dan tingkat pengungkapan menjadi semakin meningkat (Wagenhofer, 2003). Status *listing* bursa saham telah dikaitkan dengan pengungkapan (Cooke, 1989; Malone et al., 1993; Hossain et al., 1995; Wallace et al., 1994; Inchausti, 1997; Patton & Zelenka, 1997).

Cooke (1989) berpendapat bahwa biaya agensi meningkat saat pemegang saham menjadi semakin jauh dari manajemen. Karena perusahaan yang tidak *listing*

cenderung memiliki jumlah pemegang saham yang lebih kecil, maka biaya agensi diperkirakan lebih rendah daripada untuk perusahaan yang *listing*. Sebaliknya, berkenaan dengan semakin besar pemisahan antara pemilik dan manajer, maka perusahaan yang *listing* lebih besar kemungkinannya untuk mengucurkan biaya agensi yang lebih tinggi, misalnya biaya pengawasan. Biaya-biaya ini bisa dikurangi melalui pengungkapan sukarela tambahan informasi perusahaan (Schipper, 1981). Hossain et al. (1995) menyatakan bahwa status *listing* bursa saham tersebut dan pengungkapan perusahaan sukarela adalah bentuk-bentuk komplementer dari pengawasan.

2.1.2 Pelaporan Informasi Sosial dan Kebijakan Akuntansi di Indonesia.

Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial (Lewis, 1999). Lewis (1999) mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor *corporate social responsibility* ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif (*positive accounting theory*). Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan.

Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan dari Hill & Jones (1992). Mereka mengatakan bahwa

hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (*monitoring costs*), biaya kontrak (*contracting costs*), dan visibilitas politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi, pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan Belkaoui & Karpik (1989).

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaanya dalam kegiatan

sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat *leverage* yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi, pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Hill & Jones, 1992). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001). Oleh karena itu

perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat *leverage* tertentu (rasio utang/ekuitas), *interest coverage*, modal kerja dan ekuitas pemegang saham Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999). Oleh karena itu semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi Belkaoui & Karpik (1989). Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999). Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil.

Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diprosikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dan sebagainya.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996). Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

2.1.3 Pengertian *corporate social responsibility*

Secara teori *corporate social responsibility* belum ada yang disepakati secara umum. Banyak sekali teori dan definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menerangkan dan berkaitan dengan *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* bisa diarahkan kepada perusahaan itu sendiri (memperoleh

keuntungan), tenaga kerja (membayar hak-hak mereka), pemerintah (mematuhi peraturan dalam membayar pajak), masyarakat (produk yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan masyarakat).

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan *Corporate social responsibility* sebagai:

"Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large".

Bila diterjemahkan secara bebas mengandung maksud sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Menurut ISO 26000, *corporate social responsibility* diterjemahkan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

- Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
- Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*.
- Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional.
- Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang *corporate social responsibility*, *corporate social responsibility* didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk menyokong pengembangan ketahanan dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan lingkungan yang dapat bermanfaat bagi kepada perusahaan dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan *corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya.

2.1.4 Konsep *Corporate social responsibility*

Penelitian Carroll (1996:38) menjelaskan bahwa terdapat empat bagian tanggung jawab sosial yaitu:

a. Tanggung Jawab Ekonomi

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencari laba, Berbagai daya dan upaya dilakukan oleh perusahaan untuk mencari laba agar perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang, karena perusahaan yang berorientasi laba hanya bisa dipertahankan jika memperoleh laba. Seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari laba agar dapat tumbuh dan berkembang ini disebut sebagai tanggung jawab ekonomi.

Dari pandangan Carroll di atas, pada tahap ini perusahaan akan memaksimalkan pendapatan dan meminimumkan biaya untuk mencari keuntungan atau pencapaian laba yang disebut *dividend policy*. Menurut Bertens (2000) dalam

Milton Friedman menyatakan bahwa tanggung jawab ekonomi perusahaan merupakan tanggung jawab utama perusahaan tanpa melanggar peraturan, melakukan persaingan yang terbuka dan tidak melakukan penipuan.

Jika menggunakan ukuran ekonomi maka keuntungan akan diekspresikan dalam bentuk uang. Menurut Freedman (1996) bahwa jika perusahaan sudah memperoleh keuntungan secara ekonomis maka *corporate social responsibility* tersebut sudah terpenuhi. Ini didasarkan pada asumsi bahwa jika suatu perusahaan memperoleh laba, maka secara langsung akan mempunyai aspek sosial terhadap pemerintah (pajak), pekerja (gaji) dan masyarakat (memenuhi kebutuhannya).

Menurut Tjager et al. (2003) bahwa jika suatu perusahaan melaksanakan tanggung jawab ekonominya maka akan mempunyai implikasi yang luas terhadap lingkungan sosialnya. Ini disebabkan karena aktivitas perusahaan akan memberikan pendapatan bagi tenaga kerja, memberi peluang kerja bagi masyarakat di lingkungannya dan akan mewarnai aktivitas perekonomian baik lokal maupun secara nasional.

b. Tanggung Jawab Hukum

Tahap kedua adalah *legal responsibility* (tanggung jawab hukum). Pada tahap ini perusahaan akan berusaha untuk mematuhi hukum (*obey of law*) yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi konsumen, lingkungan dan tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan terikat kepada hukum, mulai dari saat akan didirikan sampai dengan tahap kegiatan, bahkan saat akan dibubarkan jika terjadi kebangkrutan (tidak diharapkan). Jadi seluruh aktivitas yang terjadi dan berlaku

dalam dalam suatu perusahaan tidak dapat lepas dan akan selalu berkaitan dengan masalah atau aspek hukum.

Hukum merupakan aturan *normative* karena menetapkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hukum merupakan aturan yang dihasilkan oleh *legislative*. Pelanggaran hukum punya sanksi yang jelas karena dituliskan hitam diatas putih. Hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Hukum bisa jadi penengah terhadap suatu permasalahan karena penyelesaiannya didasarkan pada fakta yang ada.

Bagi perusahaan mentaati peraturan yang berlaku berarti juga sudah melaksanakan tanggung jawab hukumnya. Dari sudut pandang hukum perusahaan yang taat hukum adalah gambaran perusahaan yang baik. Hukum dalam dunia bisnis bertujuan untuk mengatur berbagai bentuk transaksi yang terjadi agar bisa berjalan tanpa merugikan kepentingan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Jadi hukum berperan untuk mencegah tindakan yang bersifat *negative* dan merugikan. Oleh karena itu bisa dipahami jika hukum berperan penting dalam mengendalikan perusahaan dalam setiap kegiatannya, terutama untuk alasan tanggung jawab sosial.

Salah satu kewajiban hukum bagi perusahaan diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam undang-undang ini, sebuah perusahaan sesuai dengan pasal 18:1, bahwa sebelum beroperasi wajib mempunyai Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL). AMDAL perusahaan wajib diperbaharui setiap 4 (empat) tahun sekali.

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Walaupun demikian setiap warga masyarakat juga mempunyai kewajiban yang sama untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

c. Tanggung Jawab Etika

Tanggung jawab tahap ketiga perusahaan berada pada *ethical responsibility*. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi yang dalam taraf mikro, melihat hubungan dan tanggung jawab etis antara perusahaan sebagai manajer dan karyawan, produsen dan konsumen, investor dan *supplier* (Bertens, 35 : 2000).

Untuk melengkapi kekurangan hukum, maka diperlukan etika karena hukum tidak bisa mengatur segala sesuatu sampai mendetail dan terperinci. Zaman kekaisaran Roma (mungkin zamannya Asterix) ada istilah "*qual leges sine moribus*" artinya undang-undang tidak akan berarti bila tidak disertai dengan etika.

Perusahaan tidak akan memperoleh *benefit* secara langsung dari para *stakeholder*. Jika perusahaan berlaku etis tetapi akan memperoleh citra yang baik. Steigner & Steiner (2003) menyatakan bahwa, manajemen suatu perusahaan yang mempunyai standar etika yang tinggi akan memperbaiki citra perusahaan. Hasil *survey* di Amerika menunjukkan bahwa konsumen sangat respek dengan perusahaan yang berlaku etik dan ramah lingkungan.

Dalam konsep negara berkembang Bertens (2000) dalam De George (1993) merumuskan standar etis yang dianggap paling mendesak dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain :

- Memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian di negara mereka beroperasi.
- Harus mmemberi kontribusi pembangunan di negara mereka beroperasi.
- Menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya.
- Menghormati budaya setempat (lokal) dengan tidak melanggar norma etis.
- Harus membayar pajak.
- Bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang mengatur serta memperkuat kegiatan ekonomi dan industri.
- Perusahaan harus menjaga supaya pabrik dapat dioperasikan dengan aman.
- Perusahaan wajib merancang teknologi sehingga dapat dipakai dengan umum.

d. *Philanthropic Responsibility*

Tanggung jawab perusahaan pada tahap ini, tidak lagi terfokus pada *make a profit, obey the law, be ethical*, tetapi tanggung jawabnya sudah lebih terfokus kepada bagaimana perusahaan memberikan kontribusi untuk memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat (*to improve quality of life*), menjadi perusahaan yang tidak merugikan lingkungan dan komunitasnya (*be good corporate citizen*). Ini disebut sebagai *philanthropic responsibilities*. Menurut Carroll (1996) pada tahap ini tanggung jawabnya sudah lebih kepada masyarakat (*community*). Ini dapat dilihat dari tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerjanya (*employees*) karena menurut

Carroll, kinerja *philanthropic responsibility* perusahaan akan nampak dari kinerja tenaga kerjanya.

Kontribusi perusahaan dalam mewujudkan *philanthropic responsibility* adalah ikut berpartisipasi dan mendukung program dan kegiatan seperti: mendukung program dan kegiatan masyarakat, terlibat dalam pengembangan pendidikan.

2.1.5 Dimensi-Dimensi Pengungkapan *Corporate social responsibility*

Saat ini sudah banyak perusahaan yang berusaha untuk mensekresikan hubungannya dengan masyarakat, dengan jalan keterlibatan perusahaan untuk memperbaiki ketimpangan sosial di masyarakat. Namun disayangkan bahwa ukuran untuk menilai mana yang paling banyak memberikan kontribusi sosial atas kegiatan ini belum ada. Dengan adanya ukuran semacam ini bukan saja pemerintah dan masyarakat yang beruntung dalam mengontrol masalah lingkungan hidup dan merumuskan kebijaksanaan, perusahaan juga beruntung sehingga manajemen mengetahui sampai sejauh mana perusahaannya terlibat dalam kegiatan sosial, berapa besar kontribusinya, berapa biaya sosial yang ditimbulkan, dan akan memberikan pengaruh sosial yang baik kepada publik.

Alasan adanya kecenderungan pengungkapan *corporate social responsibility* antara lain adalah (Hackston and Milne, 1996):

1. Pengungkapan informasi *corporate social responsibility* dapat meningkatkan nama baik dan reputasi perusahaan.
2. Laporan informasi dampak sosial dapat mempengaruhi keputusan investasi karena dianggap perusahaan memiliki manajemen yang baik.

3. Dengan informasi kinerja sosial secara sukarela perusahaan dapat terhindar dari peraturan-peraturan pemerintah yang merugikan perusahaan.
4. Adanya keharusan mengungkapkan *corporate social responsibility* oleh peraturan pemerintah.

Dalam pengertian luasnya, pengungkapan berarti penyampaian (*release*) informasi. Para akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Penyampaian informasi didalam neraca, laporan rugi laba, serta laporan arus kas termasuk dalam pengakuan dan pengukuran. Pengungkapan, dalam pengertian sempitnya, menyangkut hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan pelengkap (Hendriksen, 2004).

Laporan akuntansi adalah salah satu media untuk mengkomunikasikan sekaligus mengungkapkan informasi mengenai perusahaan pada masyarakat. Fungsi akuntansi sebagai sarana komunikasi ini tidak bersifat statis, artinya harus dilakukan penyesuaian prinsip-prinsip dasar kegiatan usaha dengan tata nilai sosial. Disinilah peranan akuntansi pertanggungjawaban sosial diharapkan berpengaruh terhadap tanggung jawab perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Menurut Darrough (1993) dalam Na'im et. al, 2000 mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu: (1) pengungkapan wajib (*mandated disclosure/enforced*), merupakan pengungkapan minimal yang disyaratkan oleh standar akuntansi atau oleh peraturan yang berlaku; dan (2) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan

pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Hendrikson et al (2004:442) mengemukakan bahwa, *voluntary disclosure* dapat dikategorisasi dalam dua bagian. Pertama, *traditional voluntary disclosure* yang merupakan penyajian informasi tentang *economic performance*, yaitu *operating*, *financing* dan *investment decision*, misalnya informasi tentang perkiraan laba dan penjualan dividen dan sebagainya. Kedua, *non-traditional voluntary disclosure* merupakan informasi dalam kaitannya dengan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungannya (disebut juga dengan *social responsibility disclosure*), seperti sumber daya manusia, kebijakan lingkungan, pengembangan masyarakat dan sebagainya.

Sejalan dengan yang disebutkan diatas Zakimi (2004) menyebutkan bahwa pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) dan ada yang bersifat sukarela (*Voluntary*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu. Untuk perusahaan publik misalnya, diwajibkan untuk mengeluarkan laporan tahunan yang memenuhi tingkat pengungkapan minimum yang telah diatur oleh IAI dan Bapepam. Hal ini dimaksudkan agar informasi dalam laporan tahunan diungkapkan dengan wajar dan memadai sehingga mencerminkan hasil operasi perusahaan. Selain pengungkapan wajib, perusahaan publik juga diharapkan mengungkapkan tambahan informasi lain yang bersifat sukarela (*voluntary*). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya bersifat sukarela (*voluntary*), tidak diperiksa (*unaudited*)

dan tidak regular (*unregulated*). Pengungkapan *corporate social responsibility* meliputi beberapa dimensi, di antaranya adalah lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan hal-hal umum lainnya (Sembiring 2005).

Dimensi lingkungan meliputi pengendalian polusi, pencegahan dan perbaikan dengan pemrosesan sumber daya alam, pengolahan limbah, serta perlindungan lingkungan hidup. Perusahaan perlu mengungkapkan aktivitas sosialnya yang berhubungan dengan lingkungan karena aktivitas perusahaan mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan.

Dimensi energi meliputi bagaimana usaha perusahaan dalam menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan produksi. Di antaranya dengan melakukan daur ulang sebagai upaya dalam penghematan energi. Selain itu, aspek ini juga melihat bagaimana perusahaan berupaya dalam mengurangi konsumsi energi, serta peningkatan efisiensi energi dari produk.

Dimensi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja meliputi bagaimana perusahaan menjaga keselamatan kerja tenaga kerjanya. Caranya antara lain dengan membentuk komite keselamatan kerja, menaati peraturan standar keselamatan kerja, dan mengurangi polusi yang ada. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari usaha perusahaan dalam menjaga keselamatan tenaga kerjanya.

Dimensi tenaga kerja meliputi pemberian manfaat pada karyawan berupa program latihan dan peningkatan keterampilan, rekrutmen, pemberian gaji yang sesuai standar, mutasi, promosi, dan aktivitas lainnya sehubungan dengan balas jasa

kepada karyawan. Pengungkapan ini perlu dilakukan karena dalam melaksanakan aktivitas usahanya perusahaan mempekerjakan sejumlah besar pegawai dan buruh.

Dimensi produk dalam pengungkapan sosial melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, pelayanan, kepuasan pelanggan, keamanan produk dan pengurangan polusi akibat penggunaan produk, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lain-lain. Karena perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan konsumen, maka perusahaan memiliki tanggung jawab kepada kelompok masyarakat konsumen yang peka terhadap kualitas dan perubahan harga.

Dimensi keterlibatan masyarakat mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, misalnya aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan seni, pembangunan dan pembelanjaan rumah-rumah, perencanaan dan perbaikan perkampungan, dan aktivitas kemasyarakatan lainnya. Perusahaan perlu mengungkapkan aktivitas sosialnya berhubungan dengan masyarakat karena perusahaan menarik dana dari berbagai individu dalam masyarakat dengan berbagai hak yang melekat di dalamnya.

Sedangkan Dimensi umum meliputi kebijakan perusahaan lainnya secara umum yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* kepada masyarakat.

2.1.6 Karakteristik Perusahaan (*Company-Characteristics*) dan *Corporate social responsibility* Perusahaan

Berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya telah banyak mengaitkan luas pengungkapan dengan karakteristik perusahaan (Chow dan Boren, 1987). Karakteristik suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor, misalnya bidang

usaha, pasar, dan sumber daya. Dalam konteks laporan keuangan penentuan karakteristik perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori (Wallace *et al.*, 1994). Pertama, karakteristik yang berhubungan dengan struktur perusahaan yang mencakup variabel ukuran perusahaan, variabel *leverage*, variabel porsi kepemilikan saham oleh manajemen, umur perusahaan dan variabel porsi kepemilikan saham publik. Kedua, karakteristik yang berhubungan dengan kinerja perusahaan yang mencakup variabel *profitabilitas* dan ukuran dewan komisaris. Ketiga, karakteristik yang berhubungan dengan pasar perusahaan misalnya, dikaitkan dengan ukuran KAP (auditor) dan skope bisnis (Meliana dkk, 2009).

Pengaruh ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan dapat dijelaskan melalui hubungan agensi Jensen dan Meckling (1976). Dalam hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dan manajemen telah membebani manajer untuk mempertanggungjawabkan atas sumber daya yang dikelolanya. Semakin besar sumber daya yang dikelola perusahaan maka semakin besar pula aktivitas suatu usaha bisnis tersebut. Perusahaan yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibanding perusahaan kecil sebagai upaya mengurangi biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Selain itu berdasarkan argumen *political cost*, perusahaan besar cenderung menarik perhatian publik dan pemerintah untuk melakukan berbagai regulasi yang dapat memaksa perusahaan besar untuk mematuhi.

Karakteristik perusahaan bermakna ciri atau sudut pandang yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Ciri tersebut sangat beragam tergantung dari sudut pandang mana kita membedakannya. Pengungkapan *corporate*

social responsibility berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan karakteristik perusahaan antara lain diantaranya meliputi ukuran perusahaan, *profitabilitas*, jenis industri, *leverage*, negara peneliti, intensitas modal, perilaku eksekutif senior, umur perusahaan dll.

2.1.6.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Almilia ukuran perusahaan diartikan sebagai:

1. Alat-alat untuk mengukur (seperti meter, jengkal, dan sebagainya).
2. Sesuatu yang dapat dipakai untuk menentukan, menilai dan sebagainya.
3. Pendapatan mengukur panjangnya (lebarnya, luasnya, besarnya) sesuatu.

Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut.

Size perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud *corporate social responsibility*. Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka

perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.

Ada dugaan bahwa perusahaan yang kecil akan mengungkapkan lebih rendah kualitasnya dibanding perusahaan besar. Hal ini karena ketiadaan sumber daya dan dana yang cukup besar dalam laporan tahunan. Manajemen khawatir dengan mengungkapkan lebih banyak akan membahayakan posisi perusahaan terhadap kompetitor lain. Ketersediaan sumber daya dan dana membuat perusahaan merasa perlu membiayai penyediaan informasi untuk pertanggungjawaban sosialnya.

Di samping itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Lebih banyak pemegang saham, berarti memerlukan lebih banyak juga pengungkapan, hal ini dikarenakan tuntutan dari para pemegang saham dan para analis pasar modal. Cowen *et.al* (1987) dalam Sembiring (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial keuangan perusahaan.

2.1.6.2 Leverage

Leverage perusahaan juga memiliki hubungan dengan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Perusahaan dengan *leverage ratio* yang tinggi akan menanggung *monitoring cost* yang juga tinggi. Hal ini berarti, perusahaan dengan *leverage ratio* yang tinggi akan menyediakan informasi yang lebih luas dan detil untuk memenuhi tuntutan debitor jangka panjang, dibandingkan perusahaan dengan

leverage ratio yang rendah (Jensen et al: 1976). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Malone et al (1993: 249-273) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage ratio* yang lebih tinggi akan mengungkapkan informasi lebih luas untuk memuaskan kebutuhan para kreditur jangka panjang.

Untuk mengukur tingkat *leverage* perusahaan juga terdapat beberapa rasio atau ukuran yang umum digunakan antara lain *debt to equity* (total utang dibagi ekuitas pemegang saham), *debt to total asset ratio* (total utang dibagi total aktiva), selain itu ada juga yang mengukur dengan utang jangka panjang dibagi dengan total permodalan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ukuran total utang dibagi total *equity* seperti yang digunakan oleh Cormier (1999).

2.1.6.3 Profitabilitas

Pengungkapan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan mencerminkan suatu pendekatan perusahaan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan bersifat multidimensi. Hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* dan *profitabilitas* perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang sama dengan gaya manajerial yang dilakukan pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan (Bowman dan Haire, 1976 dalam Sembiring, 2003). Heinze (1976) dalam Gray et.al. (1995) menyatakan bahwa *profitabilitas* merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat *profitabilitas* perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial.

Riset penelitian empiris terhadap hubungan pengungkapan sosial perusahaan, *profitabilitas* menghasilkan hasil yang sangat beragam. Penelitian Bowman dan Haire (1976) serta Presto (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) mendukung hubungan *profitabilitas* dengan pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hackston dan Milne (1996) melaporkan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Rahma Yuliani (2003) menunjukkan hasil bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

2.1.6.4 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif (Fama dan Jensen, 1983, dalam Sembiring, 2003). Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih baik, karena pihak dari luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih objektif dibanding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan.

Dewan komisaris terdiri dari *inside* dan *outside director* yang akan memiliki akses informasi khusus yang berharga dan sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian. Sedangkan fungsi dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan

apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002).

Menurut Beasley (2001) dalam Sembiring (2003) ada tiga karakteristik penting dewan komisaris yang mendukung aktivitas manajemen. Karakteristik tersebut antara lain: (1) komposisi, (2) pemisahan antara pimpinan dewan komisaris dengan *Chief Executive Officer* (CEO), dan (3) ukuran dewan komisaris.

Item dan kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan yang disiapkan manajemen dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Manajemen memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi yang menguntungkan dan “menyembunyikan” informasi yang tidak menguntungkan. Informasi yang menguntungkan akan diungkap seluas-luasnya, sedangkan informasi yang tidak menguntungkan kelihatannya tidak diungkap dan sebagai hasilnya, para pemegang saham tidak akan mengetahui secara khusus informasi yang disembunyikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemegang saham mendelegasikan wewenang mereka dalam memonitor aktivitas manajemen kepada dewan komisaris.

Teori agensi telah digunakan secara luas dalam penelitian tentang dewan komisaris. Hal ini dilakukan dengan membagi tipe anggota dewan komisaris menjadi dua, yaitu: *outside* dan *inside directors* (Kosnik, 1987, dalam Arifin, 2002). Penelitian berkaitan dewan komisaris di Indonesia yang dilakukan Arifin (2002), ia menemukan bahwa komposisi dewan komisaris yang diukur dengan rasio *outside directors* terhadap jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan (positif) terhadap pengungkapan sukarela (Sembiring, 2003). Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan bagian dari pengungkapan sukarela di

Indonesia, hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan berkaitan dengan ukuran dewan komisaris. Coller dan Gregory 1999 dalam Sembiring (2003) menyatakan bahwa semakin besar anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring, sehingga yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

2.1.6.5 Kepemilikan Manajemen

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et al., 1988).

2.1.6.6 Umur Perusahaan

Umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan *corporate social responsibility*. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam publikasi laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih

banyak akan lebih mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang perusahaan.

2.1.6.7 Kepemilikan Saham Publik

Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan memberikan pengungkapan lebih luas dibanding dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Meskipun hasil penelitian susanto (1992) menunjukkan hubungan yang lemah antara tingginya kepemilikan saham publik dan luas pengungkapan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Na'im Rakhman (2000) menemukan bahwa variabel kepemilikan saham publik memiliki hubungan yang lemah dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian ini akan menguji variabel kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dengan asumsi bahwa perusahaan akan berusaha memenuhi keinginan publik yang sebagian besar saham tersebut dimiliki masyarakat. Hal ini terkait dengan teori agensi, dimana dalam teori agensi manajemen sebagai pihak agen akan berusaha memenuhi keinginan publik (*stakeholder*) selaku pihak prinsipal dengan melakukan pengungkapan informasi semaksimal mungkin sesuai keinginan pemegang saham publik.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan praktek pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dan mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan dan

kepemilikan publik) terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut meskipun dengan permasalahan yang hampir sama, tetapi hasilnya relatif berbeda.

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dan mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan dan kepemilikan publik) terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengungkapan *corporate social responsibility* telah dilakukan. Berdasarkan penelitian tersebut penyajian laporan tahunan dalam kaitannya dengan aktivitas pengungkapan *corporate social responsibility* dipengaruhi oleh antara lain oleh ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *profile*, ukuran dewan komisaris dan *leverage*. Hasil penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda terutama pada pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh chow *et al* (1987), Belkoui dan Karpik (1989), Hossain *et al.*, (1995) dan Hackstone dan Milne (1996) menemukan pengaruh yang positif dan significant antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Begitu juga dengan Sembiring (2005) juga menemukan pengaruh yang positif antara ukuran perusahaan dengan *corporate social responsibility*. Sementara Almilia (2007) tidak menemukan

hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya penelitian yang mencoba untuk mengungkapkan hubungan antara *leverage* dengan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* juga masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Hossain et al (1995), Almilia (2007) yang menemukan hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Sementara Sembiring (2005) menemukan bahwa tinggi rendahnya tingkat *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengungkapan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1	Meliana Benardi, Sutrisno dan Prihat Assih (2009)	Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan dan implikasinya terhadap asimetri informasi (studi pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang go public di Bursa	Variabel Dependen: • Luas Pengungkapan • Asimetri Informasi Variabel Independen: • Ukuran perusahaan • <i>Leverage</i> • Kepemilikan saham publik • <i>Likuiditas</i> • <i>Profitabilitas</i> • Ukuran KAP	- Ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan skope bisnis berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan laporan tahunan. - <i>Leverage</i> , kepemilikan saham publik,

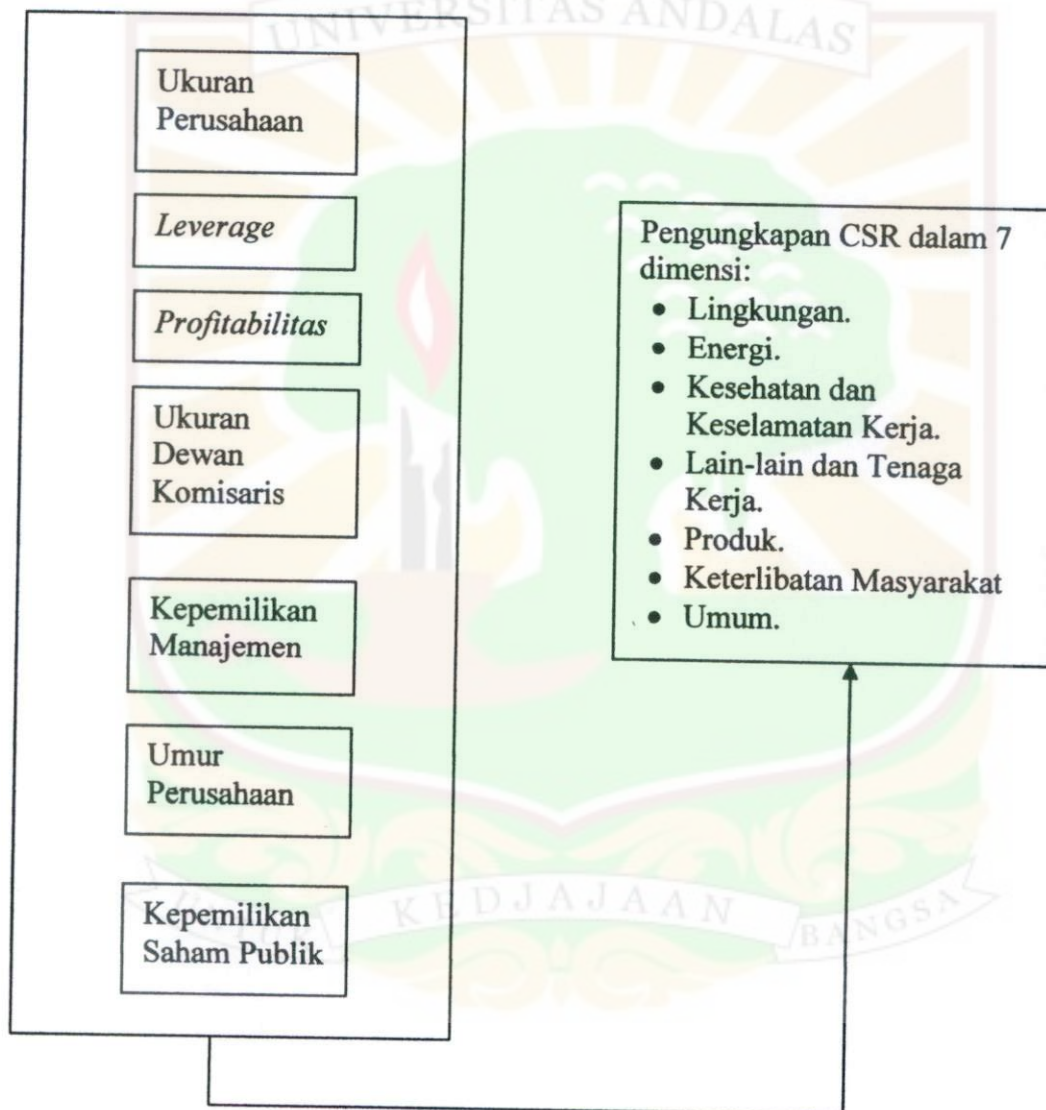
		Efek Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> • Skope Bisnis 	likuiditas dan profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan laporan tahunan.
2	Fr. Reni Retno Anggraini (2006)	Pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengungkapan informasi sosial <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepemilikan manajemen • Tingkat <i>leverage</i> • Biaya Politis • <i>Profitabilitas</i> 	Hanya variabel persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial.
3	Amalia Dessy (2005)	Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela (<i>voluntary</i>	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan sosial <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan • Rasio leverage • Basis perusahaan • Struktur 	Ukuran perusahaan, Struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas

		disclosure) pada laporan keuangan tahunan perusahaan.	kepemilikan <ul style="list-style-type: none"> • Umur perusahaan • ROE • PBV 	pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Rasio leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
4	Eddy Rismanda Sembiring (2005)	Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial: study empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan tanggung jawab sosial Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Size • Profitabilitas • Profile • Ukuran dewan komisaris • Leverage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Size, Profile, Ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial • Profitabilitas, Ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka secara sederhana dapat digambarkan kerangka penelitian seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

- H₁ : Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- H₂ : *Leverage* perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- H₃ : *Profitabilitas* perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- H₄ : Ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- H₅ : Kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- H₆ : Umur perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- H₇ : Kepemilikan Saham Publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- H₈ : Ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan, dan kepemilikan saham publik secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini jika ditinjau dari sasaran yang ingin dicapai termasuk dalam tipe *deskriptif analitis*. Disebut *deskriptif analitis* karena analisis deskriptif dimaksudkan untuk memahami karakteristik objek yang diteliti atau menyusun profil objek tersebut dalam rangka membantu membuat keputusan-keputusan sederhana (Sularso 2004). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kuncoro (2003) yang menyatakan bahwa analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menyajikan secara ringkas informasi dan sejumlah besar data yang digunakan untuk menemukan ide-ide baru mengenai hubungan antar variabel. Data-data yang terkumpul diubah ke dalam suatu bentuk yang dapat menyediakan informasi untuk menggambarkan serangkaian fakta dalam suatu keadaan yang meliputi frekuensi, tendensi, trend, untuk kemudian disajikan dalam bentuk distribusi, tabel, maupun grafik.

Penelitian ini juga menggunakan bantuan alat analisis regresi yang dilakukan untuk melihat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Tingkat pengungkapan ini ditentukan berdasarkan indeks pengungkapan yang dihitung dengan bantuan *checklist* item/unsur pengungkapan *corporate social responsibility*. *Checklist* ini menggunakan *checklist* seperti yang

digunakan pada penelitian Hackstone dan Milne (1999) yang telah dimodifikasi oleh Sembiring (2005).

3.2 Variabel penelitian dan Pengukuran

a) Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah pengungkapan *corporate social responsibility*.

Pengungkapan *corporate social responsibility* adalah pengungkapan informasi didalam laporan tahunan perusahaan. Untuk mengukur pengungkapan *corporate social responsibility* ini digunakan *corporate social responsibility* indeks yang merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang dilakukannya, dimana instrumen pengukuran dalam *checklist* yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan (Sembiring, 2005), yang mengelompokkan informasi *corporate social responsibility* ke dalam 7 dimensi yakni: Lingkungan, Energi, Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, Lain-lain tentang tenaga kerja, Produk, Keterlibatan masyarakat dan Hal-hal umum lainnya. Dimensi ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh (Hackston dan Milne, 1996). Ketujuh dimensi tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan, berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian *item* tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia maka dilakukan penyesuaian (Sembiring, 2005) hingga tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan *item* tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga *item* pengungkapan yang diharapkan dari setiap

sektor berbeda-beda. Total *item corporate social responsibility* berkisar antara 63 sampai 78, tergantung dari jenis industri perusahaan.

Pendekatan untuk menghitung *corporate social responsibility* indeks pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap *item corporate social responsibility* dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa et al, 2005). Selanjutnya, skor dari setiap *item* dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan indeks pengungkapan adalah sebagai berikut (Haniffa et al, 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007):

$$\text{indeks pengungkapan} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Dimana:

n_j : jumlah *item* untuk perusahaan j , $n_j \leq 78$

x_{ij} : dummy variabel: 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, $0 \leq \text{CSR Indeks}_j \leq 1$

b) Variabel Independen

- **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai besaran atau suatu skala yang menunjukkan suatu usaha. Banyak penelitian yang merekomendasikan bahwa ukuran perusahaan (*company size*) diukur dengan penjualan bersih.

- **Leverage**

Leverage merupakan sumber-sumber pembiayaan external (*external financial*) yang digunakan perusahaan untuk investasi atau dialokasikan pada berbagai *assets* (*fund allocation*). Adapun ukuran yang digunakan untuk variabel *leverage* ini adalah *Debt to equity ratio* per 31 Desember (Cormier 1999).

- **Profitabilitas**

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun ukuran yang digunakan untuk variabel *profitabilitas* ini adalah Laba Bersih dibagi dengan Pendapatan per 31 Desember.

- **Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang diinginkan dalam penelitian ini adalah konsisten dengan Sembiring (2003) yaitu dilihat dari banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan.

- **Kepemilikan Manajemen**

Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et al., 1998).

- **Umur Perusahaan**

Umur perusahaan menunjukkan tetap eksis (*survive*), mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan perusahaan lain yang umurnya lebih pendek, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam mengungkapkan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan.

- **Kepemilikan Saham Publik**

Variabel proporsi kepemilikan saham oleh publik, ditentukan dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik. Variabel ini *diexpectasikan* bahwa semakin besar proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh publik, maka perusahaan akan mengungkapkan *corporate social responsibility* semakin luas. Kondisi ini didasarkan pada alasan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh publik memiliki banyak pihak yang berkompetensi terhadap perusahaan yaitu sebagai pemilik (pemegang saham) yang terpisah dengan pengelolaan perusahaan (manajemen), sehingga dalam rangka pengawasan perusahaan, mereka memerlukan informasi yang seluas-luasnya.

Tabel 3.1

Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran	Skala
Ukuran Perusahaan (X_1)	Besaran dari setiap perusahaan.	Penjualan bersih	LN Penjualan bersih, per 31 Desember.	Rasio.
<i>Leverage</i> (X_2)	Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya.	<i>Debt to equity ratio</i>	Total Utang (TU) dibagi dengan <i>equity</i> , per 31 Desember.	Rasio.
<i>Profitabilitas</i> (X_3)	Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham.	<i>Net Profit Margin</i>	Laba Bersih dibagi dengan Pendapatan, per 31 Desember.	Rasio.
Ukuran dewan komisaris (X_4)	Banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.	Jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan tersebut.	Jumlah anggota dewan komisaris.	Rasio.
Kepemilikan Manajemen (X_5)	Besarnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen.	% Saham yang dimiliki manajemen.	Persentase saham yang dimiliki manajemen.	Rasio.

Umur perusahaan (X_6)	Lama perusahaan setelah menerbitkan saham perdana di BEI.	Umur perusahaan sejak penawaran saham perdana.	2006, 2007, 2008 – (tahun <i>first issue</i> di BEJ/BEI).	Rasio.
Kepemilikan Saham Publik (X_7)	Jumlah saham beredar yang dimiliki oleh publik.	% Saham yang dimiliki publik.	Persentase saham yang dimiliki publik.	Rasio.
Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (Y)	Merupakan butir-butir/ item pengungkapan yang dilakukan perusahaan melalui laporan tahunan.	Item Pengungkapan (Indeks Pengungkapan).	Indeks pengungkapan = $\frac{\sum X_{ij}}{n_j}$	Rasio.

Berdasarkan definisi dan operasionalisasi variabel penelitian, maka skala dari variabel independen dan variabel dependen penelitian merupakan skala rasio karena bisa diidentifikasi titik nol mutlak, sehingga memungkinkan menyatakan rasio atau perbandingan diantara kedua nilai, misalkan x adalah dua kali lebih y. Contohnya adalah berat, tinggi, panjang, usia, suhu dalam skala kelvin. Sebagai contoh, berat A = 70 kg, berat B = 35 kg, berat C = 0 kg. Disini kita bisa membandingkan rasio, misalnya kita bisa mengatakan bahwa berat A dua kali berat B. Berat C = 0 kg, artinya C tidak mempunyai bobot. Angka 0 di sini jelas dan berarti dan angka 0 menunjukkan nilai 0 mutlak. Memang agak sedikit susah dalam membedakan antara

skala interval dengan rasio. Kuncinya adalah di angka 0, apakah nilai nol tersebut mutlak atau tidak (Smartstat, 2010).

3.3 Populasi, Sampel dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008. Sampel penelitian diambil atas dasar *purposive sampling*, yaitu melakukan penarikan sampel berdasarkan keahlian atau kemampuan masing-masing anggota populasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Perusahaan yang dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- Semua perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006-2008, sehingga sampel yang didelisting tidak dimasukkan sebagai sampel.
- Perusahaan yang menerbitkan *annual reports* untuk tahun-tahun tersebut.
- Perusahaan mempunyai persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen.

3.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data yang bersifat sekunder, yaitu data laporan keuangan perusahaan. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari situs www.idx.co.id, yang berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan dan manufaktur yang listing di BEI. Penelitian juga menggunakan data tambahan

mengenai proporsi kepemilikan dan mengambilnya dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan

Studi tentang literatur atau kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, sehingga memperoleh dasar-dasar teori dan informasi yang mendukung.

2. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara membuat salinan data dan menggandakan arsip-arsip serta catatan laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel.

3.5. Metode analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi linear berganda digunakan karena variabel independen (X) dalam penelitian ini lebih dari satu, yaitu tujuh variabel. Analisis ini bermanfaat untuk memprediksi pengaruh beberapa variabel independen atau *explanatory variables* terhadap variabel dependen yang telah ditetapkan. Selain itu pemilihan analisis regresi ini juga didasarkan pertimbangan bahwa masing-masing variabel independen diduga berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y adalah Indeks pengungkapan *corporate social responsibility*

β_0 adalah konstanta, yaitu nilai Y jika semua variabel X bernilai nol

β_1 adalah koefisien regresi dari X1

β_2 adalah koefisien regresi dari X2

β_3 adalah koefisien regresi dari X3

β_4 adalah koefisien regresi dari X4

β_5 adalah koefisien regresi dari X5

β_6 adalah koefisien regresi dari X6

β_7 adalah koefisien regresi dari X7

X1 adalah Ukuran Perusahaan (*Size*)

X2 adalah *Leverage*

X3 adalah *Profitabilitas*

X4 adalah Ukuran dewan komisaris

X5 adalah Kepemilikan manajemen

X6 adalah Umur perusahaan

X7 adalah Kepemilikan saham publik

ε adalah Variabel lain yang tidak diuji

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis akan diuji asumsi klasik yang mendasari penggunaan persamaan model regresi linear berganda sehingga data-data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik, yaitu tidak bias dan memiliki varians yang minimum.

Uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal.

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui metode statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal maka uji statistik parametrik akan digunakan, tetapi jika data berdistribusi tidak normal maka uji non parametrik yang akan digunakan. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan grafik histogram dan grafik normal *plot*, dimana prinsip dari normalitas ditunjukkan dengan tingkat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal dan sebaliknya.

Pengujian normalitas data juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan melihat tingkat signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat probabilitas *asympt.Sig (2-tailed)*, jika probabilitas *asympt.Sig (2-tailed)* > 0,05 maka

data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika probabilitas *asympt.Sig (2-tailed)* < 0,05 maka data mempunyai distribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi yang penting terutama untuk model regresi berganda adalah bahwa variabel-variabel independen dalam model itu tidak berkorelasi secara sempurna atau diasumsikan tidak multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat angka *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas yang digunakan untuk angka *tolerance* mendekati 1, sedangkan untuk VIF kecil dari 10. Jika nilai VIF untuk semua variabel independen di bawah 10 dan angka *tolerance*-nya mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen tersebut.

Pengujian multikolinearitas akan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan rumus:

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2005).

Pengujian autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Jika angka D-W diantara -2 dan +2, berarti tidak terjadi autokorelasi (Singgih Santoso, 2000).

4. Uji Heterokedastisitas

Pengujian situasi heteroskedastis ini dilakukan dengan pendekatan grafik SPSS. Deteksi dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik tertentu, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi-Y Sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan (Singgih Santoso, 2000):

- a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terdapat situasi heteroskedastis.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi situasi heteroskedastis.

Pengujian Hipotesis:

1) Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_Y}$$

dimana :

JK_R : jumlah kuadrat regresi (*explained sum of square*)

JK_Y : jumlah total kuadrat (*total sum of square*)

Nilai R^2 berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Uji Statistik F

Untuk menguji hipotesis pertama, yaitu apakah variabel-variabel bebas dalam penelitian tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya, maka dilakukan pengujian secara bersama-sama terhadap koefisien regresi dengan menggunakan **uji F**. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan *degree of freedom* (df) = $(k-1)$ ($n-k$) untuk menentukan nilai F tabel yang merupakan patokan daerah penerimaan dan penolakan.
2. Menghitung nilai F dengan rumus (Gujarati, 2003:939)

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

R adalah Koefisien korelasi ganda

k adalah Jumlah variabel independen

n adalah Jumlah anggota sampel

F adalah F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

3) Uji Statistik t

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan secara parsial atau disebut dengan *uji t*, yaitu menguji signifikan konstansta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen (Gujarati, 2003:259). Rumusnya :

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}}$$

dimana :

β_i adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas

S_{β_i} adalah standard error dari β_i

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sampel

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengaruh karakteristik perusahaan (variabel independen) terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (variabel dependen) dengan 7 dimensi pengungkapan, yaitu Lingkungan, Energi, Kesehatan dan Keselamatan tenaga kerja, Lain-lain tentang tenaga kerja, Produk, Keterlibatan masyarakat dan Hal-hal umum lainnya.

Sampel penelitian adalah perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006-2008 yang melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan, maka diperoleh 30 perusahaan pertambangan dan manufaktur yang memenuhi syarat sebagai sampel. Daftar perusahaan yang dijadikan sampel disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Daftar Perusahaan Sampel

No.	Klasifikasi Industri	Kode	Nama Perusahaan
1	PERTAMBANGAN	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
2		NICO	Internasional Nickle Indonesia Tbk
3		AKKU	Aneka Kemasindo Utama Tbk

4	MANUFAKTUR	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
5		APLI	Asiaplast Industries Tbk
6		BRAM	Branta Mulia Tbk
7		BRNA	Berlina Tbk
8		BTON	Betonjaya Manunggal Tbk
9		BUDI	Budi Acid Jaya Tbk
10		DYNA	Dynaplast Tbk
11		ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk
12		GGRM	Gudang Garam Tbk
13		HEXA	Hexindo Adiperkasa Tbk
14		IKAI	Intikeramik Alamasri Industry Tbk
15		IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk
16		INTA	Intraco Penta Tbk
17		JKSW	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
18		JPRS	Jaya Pari Steel Tbk
19		KICI	Kedaung Indah Can Tbk
20		KONI	Perdana Bangun Pusaka Tbk
21		LION	Lion Metal Works Tbk
22		LMPI	Langgeng Makmur Plastik Industry Tbk
23		LMSH	Lion Mesh Prima Tbk
24		LTLS	Lautan Luas Tbk
25		MYRX	Hanson International Tbk

26	MANUFAKTUR	NIPS	Nipress Tbk
27		PYFA	Pyridam Farma Tbk
28		SOBI	Sorini Argo Asia CorporindoTbk
29		STTP	Siantar TOP Tbk
30		TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk

4.2 Statistik Deskriptif

Sebelum membahas hasil regresi, dibawah ini akan disajikan terlebih dahulu statistik deskriptif sampel yang merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan dimasukkan dalam proses pengujian hipotesis. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami data dimulai dari jumlah data (N), nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata (*Mean*) dan standar penyimpangan (*Std. Deviation*). Statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Ukuran Perusahaan	90	9,00	17,2	13,2	1,62
Leverage	90	-1,75	2,90	0,99	0,91
Profitabilitas	90	-0,16	0,10	0,03	0,03
Ukuran Dewan Komisaris	90	2,00	10,0	3,51	1,62
Kepemilikan Manajemen	90	0,02	9,58	2,62	2,33
Umur Perusahaan	90	2,00	19,0	12,3	4,46
Kepemilikan Saham Publik	90	6,85	98,8	29,0	16,5
Pengungkapan CSR	90	0,05	0,47	0,18	0,10

Pada tabel 4.2 diatas diperoleh nilai rata-rata (mean), tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) serta jumlah total populasi untuk setiap variabel penelitian. Pada variabel ukuran perusahaan yang diukur dari penjualan bersih memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 13,2 dengan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) yaitu sebesar 1,62. Pada tingkat *leverage* memiliki nilai rata-rata (mean) 0,99 dan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) sebesar 0,91. Pada variabel *profitabilitas* memiliki nilai rata-rata (mean) 0,03 dan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) sebesar 0,03. Pada variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai rata-rata (mean) 3,51 dan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) sebesar 1,62. Pada variabel kepemilikan manajemen memiliki nilai rata-rata (mean) 2,62 dan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) sebesar 2,33. Pada variabel umur perusahaan yang diukur dari umur perusahaan semenjak penawaran saham perdana memiliki nilai rata-rata (mean) 12,3 dan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) sebesar 4,46. Pada variabel kepemilikan saham publik memiliki nilai rata-rata (mean) 29,0 dan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) sebesar 16,5.

Pada tabel 4.2 diatas juga menginformasikan bahwa nilai rata-rata (mean) sampel memiliki tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sebesar 18% dengan tingkat penyimpangan penyebaran data (standar deviasi) 0,10. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh dari 78 item pengungkapan *corporate social responsibility* yang digunakan dalam penelitian ini dipaparkan oleh rata-rata perusahaan publik pada laporan tahunannya. Angka ini hampir sama dengan

penelitian Chau dan Gray (2001) yakni berkisar 13% dari 113 item pengungkapan sukarela pada perusahaan publik di Singapura dan Hongkong.

Pada bagian berikut ini akan diuraikan mengenai hasil pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik dalam model regresi linear berganda yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas Data

Menurut Santoso (2001) uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pola distribusi penyebaran dari nilai *variance* yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Dalam melakukan pengujian normalitas digunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Normalnya hasil pengujian ditentukan dari nilai *asympt.sig* yang dihasilkan dalam pengujian yang harus $> \alpha$ 0.05. Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan ditemukan hasil pengujian normalitas seperti yang telah diringkas pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Normalitas

Variabel Penelitian	<i>Sig</i>	<i>Alpha</i>	Keterangan
Ukuran Perusahaan	0,767	0,05	Normal
<i>Leverage</i>	0,061	0,05	Normal
<i>Profitabilitas</i>	0,059	0,05	Normal
Ukuran Dewan Komisaris	0,069	0,05	Normal
Kepemilikan Manajemen	0,085	0,05	Normal
Umur Perusahaan	0,157	0,05	Normal
Kepemilikan Saham Publik	0,098	0,05	Normal
Pengungkapan CSR	0,055	0,05	Normal

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa seluruh variabel penelitian yang terdiri dari ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan, kepemilikan saham publik dan pengungkapan CSR untuk seluruh sampel (tahun 2006-2008) mempunyai distribusi data yang normal karena probabilitas nilai statistik *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai *asympt.sig* > α 0,05 pada taraf kepercayaan 95% yaitu sebesar 0.767, 0.061, 0.059, 0.069, 0.085, 0.157, 0.098 dan 0.055.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis perlu terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui nilai keakuratan dari sebuah variabel. Salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang terpenting adalah uji multikolinearitas. Menurut Santoso (2001) uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel independen, jika terjadi hubungan yang kuat antar variabel independen maka gejala multikolinearitas terdeteksi, dan sebaliknya. Untuk mengetahui ada atau tidak gejala multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan indikator nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai $VIF < 10$ maka gejala multikolinearitas tidak terdeteksi dan sebaliknya. Berdasarkan proses estimasi data yang telah dilakukan ditemukan hasil pengujian seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Ukuran Perusahaan	0,840	1,190	Tidak Terjadi
<i>Leverage</i>	0,988	1,021	Tidak Terjadi
<i>Profitabilitas</i>	0,908	1,101	Tidak Terjadi
Ukuran Dewan Komisaris	0,723	1,383	Tidak Terjadi
Kepemilikan Manajemen	0,882	1,134	Tidak Terjadi
Umur Perusahaan	0,760	1,317	Tidak Terjadi
Kepemilikan Saham Publik	0,819	1,221	Tidak Terjadi

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan dalam pengujian atau estimasi data seluruh variabel independen yang digunakan tidak terdeteksi gejala multikolinearitas sehingga pengujian hipotesis dapat untuk dilaksanakan.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Salah satu pengujian asumsi klasik yang terpenting adalah uji autokorelasi, dalam uji ini akan diketahui pola sebaran antara satu kesalahan pengganggu dengan kesalahan pengganggu pada waktu yang lain. Syarat dilakukannya pengujian autokorelasi adalah data yang digunakan dalam sebuah pengujian adalah data *time series* atau data yang didasarkan pada dasar urutan waktu. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *pooling* (yaitu gabungan data *time series* dan *cross sectional*) oleh sebab itu pengujian autokorelasi dalam penelitian ini masih dapat

dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan ditemukan hasil seperti yang terlihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,394 ^a

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Publik, Umur Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajemen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

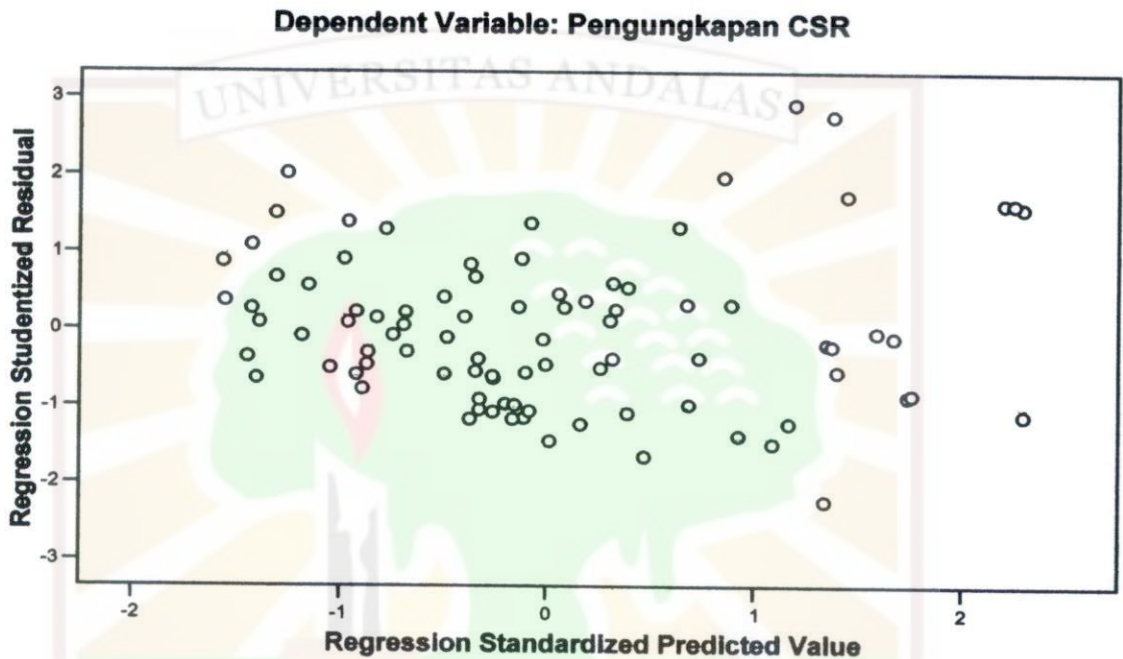
Berdasarkan hasil pengujian ditemukan nilai D-W sebesar 1,394 nilai tersebut berada diantara $-2 \geq 1,394 \geq 2$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi sehingga tahapan pengujian hipotesis dapat untuk dilaksanakan.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dibawah ini merupakan hasil dari pengujian heteroskedastisitas.

Gambar 4.1
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Scatterplot



Dengan melihat gambar diatas terlihat dengan jelas bahwa tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, untuk menganalisa data dipergunakan analisa regresi linear berganda menggunakan komputer program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat jika nilai R berada di atas 0,5 dan mendekati 1. Adapun koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi dari model penelitian dapat dilihat pada tabel 4.6:

Tabel 4.6
Hasil Uji R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,608 ^a	,369	,315	,08071

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Publik, Umur Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajemen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,608, hal ini berarti hubungan antara pengungkapan CSR dengan variabel-variabel independennya adalah kuat dengan didasarkan pada nilai R yang berada di atas 0,5. Nilai R Square yang didapat adalah 0.369 atau 36,9 %. Hasil ini menjelaskan bahwa 36,9% variabel pengungkapan CSR ditentukan oleh ketujuh variabel independen dalam penelitian yaitu ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan, dan kepemilikan saham publik. Sedangkan sisanya sebesar 63,1% (100% - 36,9%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4.2 Hasil Uji F

Uji ini bertujuan untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F ini dapat dilihat pada tabel 4.7:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,313	7	,045	6,859	,000 ^a
	Residual	,534	82	,007		
	Total	,847	89			

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Publik, Umur Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajemen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Dari hasil uji yang telah dilakukan didapat nilai F_{hitung} sebesar 6,859 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima sehingga model regresi penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini berarti ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan, dan kepemilikan saham publik secara bersama-sama dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*, atau variabel independen mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* secara signifikan.

4.4.3 Hasil Uji t

Model regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) akan memperlihatkan pengaruh ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, *profitabilitas*, ukuran

dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan, dan kepemilikan saham publik secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai masing-masing koefisien regresinya. Pengujian terhadap koefisien regresi variabel-variabel independen dilakukan dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) sebesar 95% dan *level of significance* sebesar 5%. Hasil analisis regresi berganda terhadap data penelitian ditunjukkan pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji t Statistik

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,035	,090		-,389	,698
	Ukuran Perusahaan	,019	,006	,313	3,268	,002
	Leverage	,023	,009	,214	2,422	,018
	Profitabilitas	,180	,271	,061	,666	,508
	Ukuran Dewan Komisaris	,014	,006	,235	2,274	,026
	Kepemilikan Manajemen	-,009	,004	-,208	-2,230	,029
	Umur Perusahaan	-,008	,002	-,377	-3,748	,000
	Kepemilikan Publik	,000	,001	,065	,673	,503

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Dari hasil pengolahan data maka dapat ditentukan hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,035 + 0,019 X_1 + 0,023 X_2 + 0,180 X_3 + 0,014 X_4 - 0,009 X_5 - 0,008 X_6 + 0,000 X_7$$

Dimana:

Y = Indeks Pengungkapan (pengungkapan *corporate social responsibility*)

X_1 = Ukuran Perusahaan (penjualan bersih)

X_2 = *Leverage* (debt to equity rasio)

X_3 = *Profitabilitas (net profit margin)*

X_4 = Ukuran Dewan Komisaris (Jumlah anggota dewan komisaris)

X_5 = Kepemilikan Manajemen (% Saham yang dimiliki manajemen)

X_6 = Umur Perusahaan (Umur perusahaan sejak penawaran saham perdana)

X_7 = Kepemilikan Saham Publik (% Saham yang dimiliki publik)

Dari tujuh variabel independen yang dimasukkan dalam persamaan regresi, variabel *profitabilitas* dan kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Variabel *profitabilitas* dan kepemilikan saham publik memberikan nilai signifikansi sebesar 0,508 dan 0,503 berada diatas angka 0,05, sedangkan variabel-variabel ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen dan umur perusahaan mempunyai tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002, 0,018, 0,026, 0,029 dan 0,000 yang berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian berserta pengolahannya yang bersumber dari *Annual Report* perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan ICMD 2006-2008, maka penulis dalam pembahasan ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

Hipotesis Pertama

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,002 ($p < 0,05$) dan arah pengaruhnya positif yakni 0,019. Hasil ini mendukung hipotesis penelitian pertama yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Chow dan Boren (1987), Cooke (1992), Wallace *et al.* (1994), Subtoro (2003), dan Karin dan Ahmed (2005) yang menemukan karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan. Pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan besar kecilnya *size* dari perusahaan yang tercermin dalam penjualan bersih suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan beberapa alasan bahwa perusahaan yang penjualan bersihnya besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi *corporate social responsibility* dibandingkan perusahaan yang penjualan bersihnya kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan yang penjualan bersihnya besar lebih mungkin memiliki beragam jenis produk dan beroperasi di berbagai tempat, termasuk luar negeri serta memiliki karyawan berketerampilan tinggi dalam menerapkan sistem pelaporan manajemen dengan teknologi tinggi sehingga mengharuskan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan informasi *corporate social responsibility* yang luas dikarenakan perusahaan tersebut memiliki usaha yang berskala besar yang tidak hanya menjalankan aktivitas operasional didalam negeri namun juga telah merambah ke manca negara.

Hipotesis Kedua

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,026 ($p > 0,05$). Hasil ini mendukung hipotesis penelitian kedua yang menyatakan bahwa variabel tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Meek *et al.* (1995), Na'im dan Rakhman (2000), Subroto (2003), serta Simanjuntak dan Widiastuti (2004) yang menemukan tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa terdapat suatu potensi untuk mentransfer kekayaan dari debtholders kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan yang tingkat ketergantungannya kepada utang sangat tinggi sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency costs*) yang tinggi. Untuk mengurangi biaya keagenan (biaya monitoring) manajer akan memberikan pengungkapan yang lebih luas (komprehensif) guna meyakinkan kreditur. Hal ini dikarenakan perusahaan yang tumbuh besar memiliki kewajiban yang lebih besar dalam memuaskan kebutuhannya terhadap informasi dengan cara memberikan pengungkapan *corporate social responsibility* secara lebih terperinci pada laporan tahunannya.

Hipotesis Ketiga

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa *profitabilitas* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,804 ($p > 0,05$). Hasil ini tidak mendukung hipotesis penelitian

ketiga yang menyatakan bahwa variabel *profitabilitas* perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil temuan penelitian ini sama dengan hasil penemuan yang dilakukan oleh Wallace *et al.* (1994), Mekki *et al.* (1995) dan Subroto (2003) yang menemukan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan tetap akan mengungkapkan informasi *corporate social responsibility* walaupun perusahaan tersebut dalam keadaan rugi, artinya bahwa perusahaan di Indonesia sudah mulai menganggap penting keberadaan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh akan semakin tinggi juga nilai dari kinerja *corporate social responsibility* yang dilakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Bucholdz (1978) dalam Belkaoui dan Karpik (1989) bahwa manajemen yang sadar dan masalah *corporate social responsibility* juga akan mengajukan kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan kinerja keuangan perusahaan (Sembiring, 2003).

Hipotesis Keempat

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,039 ($p > 0,05$). Hasil ini mendukung hipotesis penelitian keempat yang menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

Dikaitkan dengan *corporate social responsibility*, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan *corporate social responsibility*.

Hipotesis Kelima

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,032 ($p > 0,05$). Hasil ini mendukung hipotesis penelitian kelima yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajemen perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini sesuai dengan beberapa alasan bahwa struktur kepemilikan manajemen umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan manajemen dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Secara lebih dalam, bank dan investor institusi telah membuktikan bahwa *corporate social responsibility* merupakan salah satu faktor penting dalam keputusan investasi mereka. Sehingga, *corporate social responsibility* yang tinggi akan meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber modal.

Hipotesis Keenam

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,013 ($p > 0,05$). Hasil ini mendukung hipotesis penelitian keenam yang menyatakan bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama perusahaan tercatat dibursa maka semakin berpengalaman perusahaan dalam menghadapi beragam tuntutan *stakeholders*. Pengalaman tersebut mendorong kesadaran pihak manajemen akan manfaat dari luasnya pengungkapan informasi *corporate social responsibility* dalam memberikan pemahaman terhadap *stakeholders* akan resiko yang dihadapi dan ditanggung perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Hipotesis Ketujuh

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,440 ($p > 0,05$). Hasil ini tidak mendukung hipotesis penelitian ketujuh yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Ada beberapa alasan yang mungkin dapat menjelaskan hal ini antara lain: (1) pemilik saham publik pada umumnya merupakan investor kecil, sehingga tidak memiliki otoritas atas informasi keuangan maupun non keuangan yang diinginkan, (2) dalam realitanya banyak investor lebih mengandalkan alat analisis yang bersifat teknis dari pada alat analisis

yang bersifat fundamental, sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

Hipotesis Kedelapan

Dari hasil pengujian secara bersama-sama (simultan), dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan dan kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, yang ditunjukkan dari tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai adjusted R square sebesar 0,369 yang artinya variasi dalam perubahan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* (indeks) dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan dan kepemilikan saham publik sebesar 36,9%. Sisanya sebesar 63,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan dan manufaktur dengan seperangkat karakteristik perusahaan menunjukkan hasil yang secara statistik signifikan. Pengujian hipotesis penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, umur perusahaan dan kepemilikan saham publik secara bersama-sama (simultan) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan dan manufaktur yang diungkapkan sebesar 36,9% ($\text{Adjusted } R^2 = 0,369$). Sisanya sebesar 63,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. Jika dilihat dari signifikansinya, secara simultan variabel yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t* hitung dan nilai signifikansi dari masing-masing variabel tersebut
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen dan umur perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social*

responsibility dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan dan manufaktur.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* dan kepemilikan saham publik menunjukkan bahwa secara parsial tidak mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan dan manufaktur.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

1. Penelitian ini hanya terdiri dari tiga tahun periode pengamatan, yaitu informasi laporan tahunan dan ICMD 2006, 2007 dan 2008.
2. Perhitungan indeks CSR dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Sembiring pada tahun 2005, yaitu dengan pendekatan dikotomi (setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan) tanpa memperhatikan kualitas pengungkapannya.
3. Sampel yang digunakan hanya perusahaan pertambangan dan manufaktur saja, dan jumlah sampel hanya 30 perusahaan, sehingga tidak diketahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel independen lainnya pada jenis perusahaan lain seperti jasa, perbankan, perusahaan properti dan lainnya.

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan analisis hasil penelitian, secara teoritis dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, dan umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan dan manufaktur, sedangkan *profitabilitas* dan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan dan manufaktur. Untuk itu, bagi perusahaan yang telah melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan agar tetap mengungkapkannya dan menambah item pengungkapan. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan kualitas pengungkapan *corporate social responsibility*, tidak hanya kuantitasnya saja. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI terutama perusahaan pertambangan dan manufaktur sebaiknya juga mulai menggunakan *Sustainability Reporting* (Laporan Berkelanjutan) sebagai media pengungkapan *corporate social responsibility* agar pihak-pihak yang berkepentingan lebih memahami dan mudah menganalisis kondisi perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, bagi perusahaan yang belum mengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporannya, harus segera melakukan pengungkapan ini karena sudah adanya aturan-aturan yang tegas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang diungkapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Linda. 2008. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Keuangan pada *Website* Perusahaan.
- Almilia, Dessy. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) Pada Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*. Vol 1, No.2, November 2005.
- Almilia, Luciana Spica, dkk. 2007. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional*, Jakarta.
- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Ardana, I Komang. 2008. Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. *Buletin Studi Ekonomi* Volume 13 Nomor 1.
- Ball, R., and Foster, G. 1982. *Corporate Financial reporting: A Methodological Review of Empirical Research*. *Journal of Accounting Research*, Vol. 20 Supplement, P. 161-234.
- Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. *Determinants of the Corporate Decision to Disclose Sosial Information*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2, No. 1, p. 36- 51.
- Bertens, Kees. 2000. *Seri Filsafat: Etika Bisnis*. Kanisius, Yogyakarta.
- Benardi, K Meliana, dkk. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan dan Implikasinya Terhadap Asimetri Informasi (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Sektor Manufaktur yang *Go Public* Di Bursa Efek Indonesia).
- Bondan, Ignatius Suratno, dkk. 2006. Pengaruh *Environmental Performance* Terhadap *Environmental Disclosure* dan *Economic Performance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004). *Simposium Nasional Akuntansi IX* Padang.
- Budiarta, Ketut. 2008. Cara Pandang Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 Terhadap *Corporate social responsibility* (CSR). *Buletin Studi Ekonomi* Volume 13 Nomor 2.

- Carroll, Archie B. 1996. *Business and Society, Ethics and Stakeholder Management*, South Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 3rd Edition.
- Chow, C.W., and Wong-Boren, A. 1987. *Voluntary Corporate Disclosure by Mexican Corporations. The Accounting Review* Vol LXII.
- Cormier, D. and Magnan, M. 1999. *Corporate Environmental Disclosure Strategies: Determinants, Costs and Benefit. Journal of Accounting, Auditing and Finance*, Vol. 14, No.4, pp.429-451.
- Daniri, Achmad. 2008. *Standarisasi Corporate social responsibility*.
- Dawkins, J. 2004. *The Public's Views of Corporate Responsibility 2003, White Paper Series, MORI*. Diakses 2 Juni 2010 <http://www.ipsos-mori.com/publications/whitepapers/index.html> >.
- Fadila, Delia. 2008. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Aspek-Aspek CSER. Skripsi S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Fitriany. 2001. Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi IV. Bandung. 30-31 Agustus.
- Freedman, M. and Jaggi. M. 1988. *An analysis of the association between pollution disclosure and economic performance. Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 1 No. 2, pp. 43-58.
- Gray, R., Javad, M., Power, David M., and Sinclair C. Donald. 2001. *Social and Environmental Disclosure, and Corporate Characteristic: A Research Note and Extension. Journal of Business Finance and Accounting*, Vol 28 No. 3, pp 327-356.
- Ghozali, Iman. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*, 4th Edition, New York, McGraw Hill.
- Hackston, David and Markus J. Milne. 1996. *Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9, No. 1, pp. 77-108.
- Haniffa, R.M. and Khrisna G. Palepu. 2005. *The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. Journal of Accounting and Public Policy* 24, pp 391-430.

- Hardina, Rosmasita. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*) dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ. Skripsi S-1 Universitas Islam Indonesia.
- Hendriksen, Eldon. 1994. *Accounting Theory*, Third Edition, Mc.Hill, USA.
- Henny dan Murtanto. 2001. Analisis Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hill, Charles W.L. and Thomas M. Jones. 1992. *Stakeholder-Agency Theory*. *Journal of Management Studies*. Vol. 29, No. 2, p. 131-154.
- Hill, Ronald, Thomas Ainscough, Todd Shank and Dary Manullang. 2007. *Corporate Sosial Responsibility and Socially responsible investing : A Global Perspective*. *Journal of Business Ethics*, Vol. 70 Issue 2, p165.
- Hossain, M. H. B. Perera and A. R. Rahman. 1995. *Voluntary Disclosure in the Annual Reports of New Zealand Companies*. *Journal of Intenational Financial Management and Accounting* 6:1.
- Sutomo, Ibnu. 2004. Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Pada Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Di BEJ). Tesis S-2 Universitas Diponegoro.
- Indonesian Capital Market Directory. 2006.
- Indonesian Capital Market Directory. 2007.
- Indonesian Capital Market Directory. 2008.
- Jensen, Michael. C. And William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3. October: 305.
- Kotler, Philip and Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: doing the most good for your company and your cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Lewis, Linda and Jeffrey Unerman. 1999. *Ethical Relativism: A Reason for Differences in Corporate Social Reporting*. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 10, p. 521-547.
- Machmud, Novita dan Chaerul D. Jakman. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*CSR Disclosure*) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.

- Maksum, Azhar dan Azizul Kholis. 2003. Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (*Corporate Responsibility and Sosial Accounting*): Studi Empiris Di Kota Medan. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
- Malone, D., Fries, C., and Jones, T. 1993. *An Emperical Investigation of the Extent of Corporate Financil Disclosure in the Oil and Gas Industry. Journal of Accounting, Auditing, and Finance.*, Vol. 8 No. 3 p. 249-273.
- Marpaung, Anggita Zoraya. 2009. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*) Dalam Laporan Keuangan Tahunan. Skripsi S-1 Universitas Sumatera Utara.
- Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi IV, Bandung. 30-31 Agustus.
- Mirfazli, Edi dan Nurdiono. 2007. Evaluasi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan dalam Kelompok Aneka Industri yang *Go Public* di BEJ. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 12 No. 1, Januari 2007, Lampung.
- Mujiyono. 2004. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta). Tesis S-2 Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, 2002, Auditing: Jilid 1 Edisi Enam. Salemba Empat, Jakarta.
- Muslim, Utomo. 2000. Praktek Pengungkapan Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia. *Proceedings* Simposium Nasional Akuntansi III, hal. 99-122.
- Na'im, Ainun dan Fu'ad Rakhman. 2000. Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Volume 15 No. 1 Januari, hal 71-82.
- Purnamasari, Yuneva. 2009. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Aspek-Aspek Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Sabeni, Arifin .2002. *An Emprical Analysis of The Relation Between The Board of Director's Composition an the level of Voluntary Disclosure. Proocedings For The Fifth Indonesian Conference On Accounting*, No. 5 pp. 46-57.
- Santoso, Singgih. 2003. Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Sembiring, Eddy Rismanda. 2003. Kinerja Keuangan, *Political Visibility*, Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Sipetu, Andre Christian. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Skripsi S-1 Universitas Sumatera Utara.
- Sudibyo, Bambang. 1990. Kemungkinan Pengembangan Akuntansi Pertanggung-jawaban Sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* No. 1 Vol. V : 21-37, Yogyakarta.
- Suryani. 2007. Pengaruh *Profile* dan *Size* Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Pada Perusahaan *Food and Beverages* yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Skripsi S-1 Universitas Negeri Semarang.
- Susanto, Djoko. 1992. *An Empirical Investigation of the Corporate Disclosure in Annual Reports of Companies Listed on the Jakarta Stock Exchange*, Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi Jakarta, Disertasi S-3, University of Arkansas, USA.
- Steigner, George Albert and John F. Steiner. 2003. *Business, Government, and Society : A Managerial Perspective, Text and Cases*; Mc Graw Hill Higher Education, New York.
- Tjager, I Nyoman et al. 2003. *Corprorate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. *Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, Prenhallindo, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Utomo, Muhammad Muslim, 2000. Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia (Studi Perbandingan antara Perusahaan *High Profile* dan *Low Profile*), Yayasan Mitra Mandiri.
- Wallace, R.S. Olusegun, Kamal Naser dan Aracelu Mora. 1994. *The Relation Between the Comprehensives of Corporate Anual Report and Firm Characteristich in Spain. Accounting and Business Research* 25 (Winter): 41-53.
- Wicaksono, Adhi Anjar. 2002. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial dan Publik, Ukuran Perusahaan, EBIT/SALES dan Total Utang/Total Aset Terhadap Nilai Perusahaan yang Telah *Go Public* dan Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Tesis S-2 Universitas Diponegoro.

Wirasastri, Aan. 2009. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social and Environmental Responsibility* (CSER) Terhadap Reaksi Investor (Studi pada Perusahaan *High Profile* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Zakimi, Fathilatul Abdul Hamid. 2004. "*Corporate Social Disclosure By Banks And Finance Companies : Malaysian Evidence*", *Corporate Ownership & Control* / Vol. 1, Issue 4, Summer



Lampiran I: Kategori Pengungkapan CSR (Total 78 Item)

I. Lingkungan

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi.
2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi.
3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi.
4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi.
5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.
6. Penggunaan material daur ulang.
7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan.
8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan.
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan.
10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.
11. Pengolahan limbah.
12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan.
13. Perlindungan lingkungan hidup.

II. Energi

1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi.
2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.
3. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang.
4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi.
5. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk.
6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk.
7. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.

III. Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga kerja

1. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja.
2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental.
3. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja.
4. Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja.
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja.
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja.
8. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.

IV. Lain-lain tentang Tenaga Kerja

1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat.
2. Mengungkapkan persentase atau jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat manajerial.
3. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan.
4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat.
5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja.
6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan.
7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.
8. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan.
9. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan.
10. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.
11. Mengungkapkan persentase gaji untuk pensiun.
12. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan.
13. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.
14. Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada.
15. Mengungkapkan disposisi *staff* di mana *staff* ditempatkan
16. Mengungkapkan jumlah *staff*, masa kerja dan kelompok usia mereka.
17. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja.

18. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.
19. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja.
20. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.
21. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja.
22. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan.
23. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.
24. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh.
25. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja.
26. Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan.
27. Peningkatan kondisi kerja secara umum.
28. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja.
29. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.

V. Produk

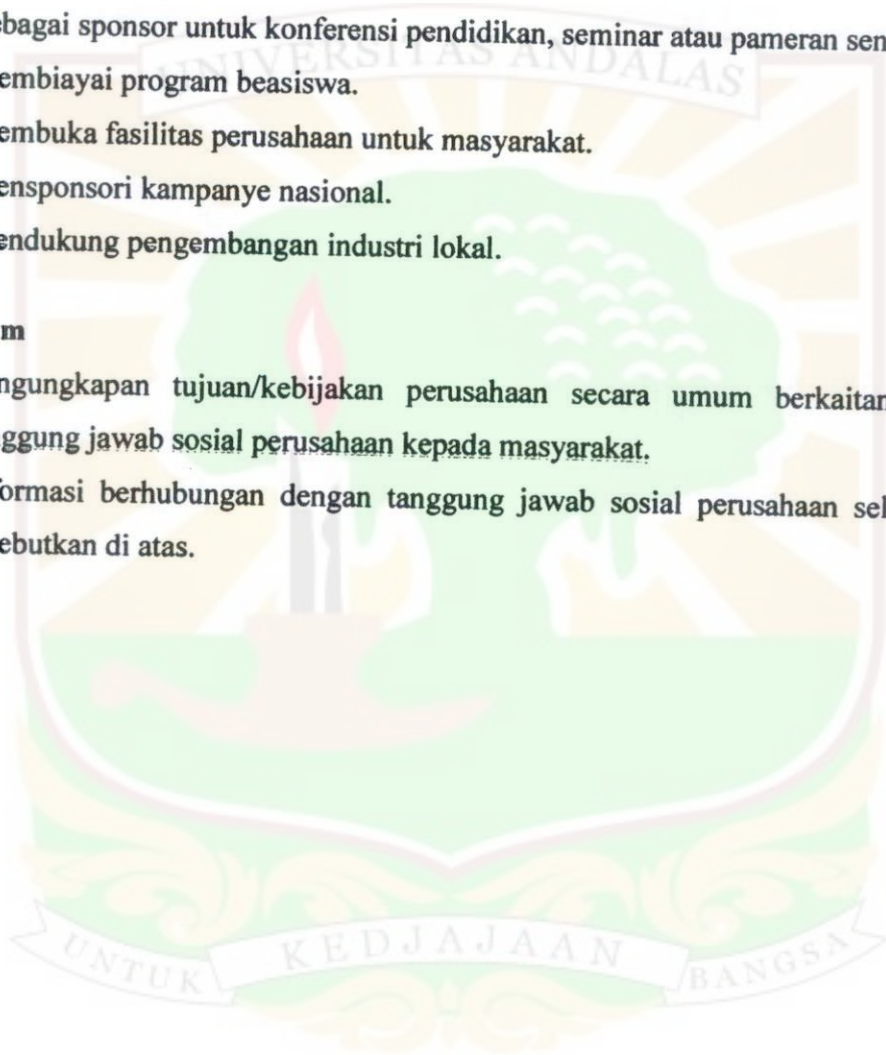
1. Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya.
2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk.
3. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk.
4. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan.
5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen.
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan.
7. Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk.
8. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan.
9. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan.
10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000).

VI. Keterlibatan Masyarakat

1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni.
2. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar.
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.
4. Membantu riset medis.
5. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni.
6. Membiayai program beasiswa.
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.
8. Mensponsori kampanye nasional.
9. Mendukung pengembangan industri lokal.

VII. Umum

1. Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
2. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas.



PERTAMBANGAN (2006-2008)

2. Internasional Nickle Indonesia Tbk (NICO)

1. Energi Mega Persada Tbk (ENRG)

Kategori (Total 78 item)

I. Lingkungan

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset & pengembangan untuk pengeluaran polusi
2. Pernyataan yg mmunjukkan bhw operasi prshn tdk mengakibatkan polusi/memenuhi ketentuan hukum&peraturan polusi
3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi
4. Pencegahan/pertbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan/reboisasi
5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas
6. Penggunaan material daur ulang
7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan
8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan
10. Kontribusi dalam penerangan bangunan bersejarah
11. Pengolahan limbah
12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan
13. Perlindungan lingkungan hidup

Total Lingkungan

II. Energi

1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
3. Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang

06 07 08 06 07 08

1 1 0 1 1 1

1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

8 10 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

	1			2		
	06	07	08	06	07	08
III. Energi - Lanjutan						
4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	0	0	0	0	0	0
5 Peningkatan efisiensi energi dari produk	0	0	0	0	0	0
6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk	0	0	0	0	0	0
7. Kebijakan energi perusahaan	0	0	0	1	1	1
Total Energi	0	0	0	2	2	2
III. Kesehatan dan Keselamatan Kerja						
1. Mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja	1	1	1	1	1	1
2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	1	1	1	1	1	1
3. Statistik kecelakaan kerja	1	1	1	1	1	1
4. Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	1
5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	1
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0
8. Pelayanan kesehatan tenaga kerja	1	1	1	1	1	1
Total Kesehatan dan Keselamatan Kerja	6	6	6	6	6	6
IV. Lain-lain Tenaga Kerja						
1. Perkrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0
2. Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat manajerial	0	0	0	0	0	0
3. Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan	0	0	0	0	0	0
4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0
5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	1	1	1	1	1	1
6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	0	0	0	0	0	0
7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	1	1	1	1	1	1
8. Bantuan atau bimbingan atk tenaga kerja yg dalam proses mengundurkan diri atau yg telah membuat kesalahan	0	0	0	0	0	0
9. Perencanaan kepemilikan rumah karyawan	0	0	0	0	0	0
10. Fasilitas untuk aktivitas rekreasi	0	0	0	0	0	0
11. Persentase gaji untuk pensiun	1	1	1	1	1	1
12. Kebijakan penggajian dalam perusahaan	1	1	1	1	1	1
13. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan	1	1	1	1	1	1
14. Tingkat manajerial yang ada	1	1	1	1	1	1
15. Disposisi staff-dimana staff ditempatkan	1	1	1	1	1	1
16. Jumlah staff, masa kerja, dan kelompok usia mereka	0	0	0	1	1	1
17. Statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja	0	0	0	0	0	0
18. Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	1	1	1	1	1	1
19. Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	0	0	0	0	0	0
20. Rencana pembagian keuntungan lain	1	1	1	1	1	1
21. Informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	1	1	1	1	1	1

	1					2				
	06	07	08	06	07	08	06	07	08	08
IV. Lala-lain Tenaga Kerja - Lanjutan										
22. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	1	1	1	0	1	1				
23. Laporan tenaga kerja yang terpisah	0	0	0	0	0	0				
24. Hubungan perusahaan dengan serikat buruh	1	1	1	0	1	1				
25. Gangguan dan aksi tenaga kerja	0	0	0	0	0	0				
26. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja diorganisasikan	1	1	1	0	0	0				
27. Kondisi kerja secara umum	0	1	1	1	0	1				
28. Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	1	0	0	0	0	1				
29. Statistik perputaran tenaga kerja	0	0	0	0	0	0				
Total Lala-lain Tenaga Kerja	13	14	14	6	9	10				
V. Produk										
1. Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya	1	1	1	1	1	1				
2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk	0	0	0	0	0	0				
3. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	1	1	1	1	1	1				
4. Produk memenuhi standar keselamatan	0	0	0	0	0	0				
5. Membuat produk yang lebih aman untuk konsumen	0	0	0	0	0	0				
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan	0	0	0	0	0	0				
7. Peningkatan kebersihan atau kesehatan dalam pengolahan dan penyajian produk	0	0	0	0	0	0				
8. Informasi atas keselamatan produk perusahaan	0	0	0	0	0	0				
9. Informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	0	0	0	0	0	0				
10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000)	0	0	0	0	0	0				
Total Produk	2	2	2	2	2	2				
VI. Keterlibatan Masyarakat										
1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni	1	0	0	1	1	1				
2. Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar	0	0	0	0	1	1				
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	0	1	1	1	1	1				
4. Membantu riset medis	0	0	0	0	0	0				
5. Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni	0	1	1	1	1	1				
6. Membiayai program beasiswa	1	1	1	1	1	1				
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	0	1	1	1	1	1				
8. Sponsor kampanye nasional	0	0	0	0	1	1				
9. Mendukung pengembangan industri kecil	1	1	0	1	1	1				
Total Keterlibatan Masyarakat	3	5	4	8	8	8				
VII. Umum										
1. Tujuan/kebijakan perusahaan scr umum berkaitan dg tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	0	0	1	0	0	0				
2. Informasi berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	0	0	1	1	1	1				
Total Umum	0	0	2	1	1	1				
TOTAL SELURUH ITEM YANG DIUNGKAPKAN	32	37	36	33	36	37				

1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
3. Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
II. Energi - Lanjutan																								
4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Peningkatan efisiensi energi dari produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kebijakan energi perusahaan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Energi	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	0	0	0	2	2	0	2	1
III. Kesehatan dan Keselamatan Kerja																								
1. Mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Statistik kecelakaan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
4. Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pelayanan kesehatan tenaga kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
Total Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2	2	2	2	2	1	3	3	3	2	0	2	2	5	3	2	0	2	2	3	2	0	2	2
IV. Lain-lain Tenaga Kerja																								
1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat manajerial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
8. Bantuan atau bimbingan utk tenaga kerja yg dalam proses mengundurkan diri atau yg telah membuat kesalahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Perencanaan kepemilikan rumah karyawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Fasilitas untuk aktivitas rekreasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Persentase gaji untuk pensiun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
12. Kebijakan penggajian dalam perusahaan	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tingkat manajerial yang ada	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Disposisi staff-dimana staff ditempatkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jumlah staff, masa kerja, dan kelompok usia mereka	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
17. Statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
19. Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Rencana pembagian keuntungan lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

	3		4		5		6		7		8		9		10			
	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
IV. Lain-lain Tenaga Kerja - Lanjutan																		
22. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Laporan tenaga kerja yang terpisah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Hubungan perusahaan dengan serikat buruh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Gangguan dan aksi tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Kondisi kerja secara umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Statistik perputaran tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Lain-lain Tenaga Kerja	5	9	8	7	7	8	5	6	7	4	4	7	5	5	2	6	6	7
V. Produk																		
1. Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Produk memenuhi standar keselamatan	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5. Membuat produk yang lebih aman untuk konsumen	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Peningkatan kebersihan atau kesehatan dalam pengolahan dan penyajian produk	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Informasi atas keselamatan produk perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Produk	5	5	4	5	7	7	4	6	5	3	5	4	1	0	0	0	1	1
VI. Keterlibatan Masyarakat																		
1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
2. Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa/pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
4. Membantu riset medis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6. Membiayai program beasiswa	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sponsor kampanye nasional	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Mendukung pengembangan industri lokal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Keterlibatan Masyarakat	5	5	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	2	3	1	3
VII. Umum																		
1. Tujuan/kebijakan perusahaan scr umum berkaitan dg tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Informasi berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total Umum	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL SELURUH ITEM YANG DIUNGKAPKAN																		
	20	26	25	19	23	23	21	25	25	13	17	19	16	19	21	8	11	13
									</									

MANUFAKTUR (2006-2008)

Kategori (Total 78 item)												
I. Lingkungan												
1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluhan riset & pengembangan untuk pengeluaran polusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Penyataan yg menunjukkan bhw operasi prtn tdk mengakibatkan polusi/memenuhi ketentuan hukum&peraturan polusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Penyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4. Pencegahan/perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan/reboisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Penggunaan material daur ulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Menemina pengurangan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan bersejarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pengolahan limbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Perlindungan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Lingkungan	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
II. Energi												
1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3. Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
12. Gudang Garam Tbk (GGRM)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
13. Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
14. Intikramik Alamasri Industry Tbk (IKAI)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
15. Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
16. Intraco Penta Tbk (INTA)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
17. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
18. Jaya Pari Steel Tbk (JPRS)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08

	11		12		13		14		15		16		17		18			
	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
III. Energi - Lanjutan																		
4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Peningkatan efisiensi energi dari produk	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
7. Kebijakan energi perusahaan	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Total Energi	1	4	5	1	2	3	2	1	1	2	1	1	2	0	3	0	4	0
III. Kesehatan dan Keselamatan Kerja																		
1. Mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Statistik kecelakaan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
8. Pelayanan kesehatan tenaga kerja	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1	2	2	1	1	2	1	2	3	1	0	1	0	2	0	1	1	3
IV. Lain-lain Tenaga Kerja																		
1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat manajerial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
8. Bantuan atau bimbingan utk tenaga kerja yg dalam proses mengundurkan diri atau yg telah membuat kesalahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Perencanaan kepemilikan rumah karyawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Fasilitas untuk aktivitas rekreasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Persentase gaji untuk pensiun	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
12. Kebijakan penggajian dalam perusahaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
14. Tingkat manajerial yang ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Disposisi staff-dimana staff ditempatkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jumlah staff, masa kerja, dan kelompok usia mereka	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Rencana pembagian keuntungan lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		11		12		13		14		15		16		17		18			
		06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
IV. Lain-lain Tenaga Kerja - Lanjutan																			
22. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Laporan tenaga kerja yang terpisah		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Hubungan perusahaan dengan serikat buruh		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
25. Gangguan dan aksi tenaga kerja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja diorganisasikan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Kondisi kerja secara umum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Statistik peraturan tenaga kerja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Lain-lain Tenaga Kerja		3	2	2	3	3	3	6	6	4	0	2	0	3	4	1	3	3	5
V. Produk																			
1. Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gambaran pengembangan riset dan pengembangan produk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Produk memenuhi standar keselamatan		0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
5. Membuat produk yang lebih aman untuk konsumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Peningkatan kebersihan atau kesehatan dalam pengolahan dan penyajian produk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Informasi atas keselamatan produk perusahaan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9. Informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Produk		0	0	0	1	1	2	1	2	0	1	0	1	0	1	3	1	0	2
VI. Keterlibatan Masyarakat																			
1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni		1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1
2. Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa/pelajar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
4. Membantu riset medis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Membayar program beasiswa		1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sponsor kampanye nasional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Mendukung pengembangan industri lokal		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Keterlibatan Masyarakat		2	3	1	0	3	2	2	2	3	1	1	3	2	3	3	3	0	2
VII. Umanis																			
1. Tujuan/kebijakan perusahaan ser umum berkaitan dg tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat		1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
2. Informasi berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas		1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Total Umanis		2	2	2	0	2	0	2	2	2	1	2	2	2	2	0	1	2	2
TOTAL SELURUH ITEM YANG DIUNGKAPKAN		9	14	13	7	12	13	14	16	13	7	6	9	9	13	12	10	11	14

MANUFAKTUR (2006-2008)

Kategori (Total 78 item)												
I. Lingkungan												
1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset & pengembangan untuk pengeluaran polusi	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
2. Pernyataan yg menunjukkan bahwa operasi prshn tdk mengakibatkan polusi/memenuhi ketentuan hukum&peraturan polusi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4. Pencegahan/perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan/reboisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Penggunaan material daur ulang	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan bersejarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pengolahan limbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13. Perlindungan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Total Lingkungan	0	2	0	1	2	2	0	2	2	3	1	1
II. Energi												
1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26. Nipress Tbk (NIPS)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
25. Hanson International Tbk (MYRX)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
24. Lautan Luas Tbk (LTLS)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
23. Lion Mesh Prima Tbk (LMSH)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
22. Langgeng Makmur Plastik Industry Tbk (LMPI)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
21. Lion Metal Works Tbk (LION)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
20. Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
19. Kedaung Indah Can Tbk (KICI)	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08

	19			20			21			22			23			24			25			26		
	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
IV. Lain-lain Tenaga Kerja - Lanjutan																								
22. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Laporan tenaga kerja yang terpisah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Hubungan perusahaan dengan serikat buruh	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25. Gangguan dan aksi tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Kondisi kerja secara umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Statistik perputaran tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Lain-lain Tenaga Kerja	3	3	4	4	0	3	0	6	4	1	7	6	3	8	6	7	6	7	0	4	3	4	3	3
V. Produk																								
1. Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Produk memenuhi standar keselamatan	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Membuat produk yang lebih aman untuk konsumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Peningkatan kebersihan atau kesehatan dalam pengolahan dan penyajian produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Informasi atas keselamatan produk perusahaan	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Informasi mata produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Produk	0	0	4	1	4	3	3	3	4	2	1	3	2	3	4	3	1	3	4	0	2	1	2	2
VI. Keterlibatan Masyarakat																								
1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2. Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4. Membantu riset medis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Membiayai program beasiswa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sponsor kampanye nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Mendukung pengembangan industri lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Keterlibatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	2	2	4	1	0	2	0	1	1	1
VII. Umum																								
1. Tujuan/kebijakan perusahaan scr umum berkaitan dg tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
2. Informasi berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Total Umum	0	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2	1	1	0	1	0	1
TOTAL SELURUH ITEM YANG DIUNGKAPKAN	6	8	11	10	11	14	5	16	17	7	15	17	7	16	18	17	16	19	7	6	10	6	7	10

	06	07	08	06	07	08
& pengembalian untuk pengeluaran polisi	0	0	0	0	0	0
kegiatan polisi/menenuhi ketentuan hukum&peraturan polisi	0	1	1	0	0	0
di atau akan dikurangi	0	0	0	1	1	1
politan sumber alam, misalnya reklamasi daratan/reboisasi	0	0	0	1	0	0
besi, minyak, air, dan kertas	0	0	0	0	0	0
ngan yang dibuat perusahaan	0	0	0	0	0	0
di lingkungan	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
apak lingkungan perusahaan	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	4	2	2
operasi	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	27			28			29			30		
	06	07	08	06	07	08	06	07	08	06	07	08
II. Energi - Lanjutan												
4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5. Peningkatan efisiensi energi dari produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kebijakan energi perusahaan	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Total Energi	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
III. Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
1. Mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
3. Statistik kecelakaan kerja	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
4. Menasati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
5. Melakukan pengurangan berkaitan dengan keselamatan kerja	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
8. Polymon kesehatan tenaga kerja	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
Total Kesehatan dan Keselamatan Kerja	0	2	2	3	7	7	7	3	4	4	1	1
IV. Laki-laki Tenaga Kerja												
1. Pendidikan atau keterampilan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat manajerial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pelatihan tenaga kerja melalui program bertahap di tempat kerja	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Memberikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
8. Bantuan atau bantuan untuk tenaga kerja yg dalam proses mengundurkan diri atau yg telah membuat kesalahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Pemasukan kepemilikan rumah karyawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Fasilitas untuk aktivitas rekreasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Persentase gaji untuk pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Kebijakan penggantian dalam perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tingkat manajerial yang ada	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
15. Disposisi staff-dimana staff ditempatkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jumlah staff, masa kerja, dan kedompok usia mereka	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
17. Statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Rencana pembagian keuntungan lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	27		28		29		30				
	06	07	08	06	07	08	06	07	08		
IV. Lala-lala Tenaga Kerja - Lanjutkan											
22. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. Laporan tenaga kerja yang terpisah	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24. Hubungan perusahaan dengan serikat buruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25. Gangguan dan aksi tenaga kerja	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
26. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27. Kondisi kerja secara umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28. Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29. Statistik perputaran tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Lala-lala Tenaga Kerja	3	3	3	1	3	2	2	4	1	3	2
V. Produk											
1. Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2. Gambaran pengembangan riset dan pengembangan produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Produk memenuhi standar keselamatan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
5. Membuat produk yang lebih aman untuk konsumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Penempatan karyawan atau kesehatan dalam pengolahan dan penyajian produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8. Informasi atas keselamatan produk perusahaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9. Informasi mutu produk yang dicerminkan dalam pemenuhan pengurangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total Produk	2	0	0	0	0	1	0	0	0	7	4
VI. Keterlibatan Masyarakat											
1. Sumbangan uang, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pesajar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
4. Membantu riset medis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
6. Membayar program beasiswa	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8. Sponsor kampanye nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9. Mendukung pengembangan industri lokal	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Total Keterlibatan Masyarakat	2	2	3	5	2	3	3	3	5	4	5
VII. Umum											
1. Tujuan/kegiatan perusahaan ser umum berkaitan dg tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
2. Informasi berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	0	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1
Total Umum	0	3	3	2	3	3	1	2	2	2	2
TOTAL SELURUH ITEM YANG DIUNGKAPKAN	7	10	11	14	19	20	10	15	17	17	19

Lampiran IV: Data Variabel Independen dan Dependen

NO	PERUSAHAAN		PENJUALAN (UKURAN PERUSAHAAN)			TOTAL KEWAJIBAN			TOTAL EQUITY			LEVERAGE		
			2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	1.459.460	1.137.543	1.859.071	6.879.108	6.022.531	8.879.921	1.894.724	3.352.239	3.711.241	3,63	1,80	2,39
2	INCO	International Nickel Indonesia (INCO) Tbk	12.073.058	21.907.257	14.367.462	3.970.585	4.715.792	3.522.615	15.187.071	13.059.707	16.653.680	0,26	0,36	0,21
3	AKKU	Aneka Kemasindo Utama Tbk	22.354	23.062	8.070	16.650	19.337	16.432	34.587	34.548	26.427	0,48	0,56	0,62
4	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk	1.969.677	2.321.871	2.376.798	793.180	924.245	1.200.831	456.530	446.682	435.837	1,74	2,07	2,76
5	APLI	Asiaplast Industries Tbk	161.450	192.974	300.786	132.536	164.930	150.600	134.888	130.304	125.482	0,98	1,27	1,20
6	BRAM	Branta Mulia Tbk	1.510.642	1.547.112	1.637.886	507.215	462.352	480.181	833.625	894.006	998.025	0,61	0,52	0,48
7	BRNA	Bertina Tbk	306.652	375.941	479.934	244.417	210.370	230.647	147.240	156.532	181.297	1,66	1,34	1,27
8	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk	57.254	115.203	172.391	8.043	12.054	15.271	25.632	34.415	55.238	0,31	0,35	0,28
9	BUDI	Budi Acid Jaya Tbk	1.072.908	1.350.298	1.551.987	664.155	821.355	1.050.059	228.784	625.962	618.850	2,90	1,31	1,70
10	DYNA	Dynaplast Tbk	1.002.786	1.139.156	1.382.074	655.211	635.690	717.902	383.385	388.879	401.249	1,71	1,63	1,79
11	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk	396.282	421.311	714.819	154.501	71.015	168.086	361.836	368.531	248.823	0,43	0,19	0,68
12	GGRM	Gudang Garam Tbk	26.339.297	27.389.365	30.251.643	8.558.428	9.640.418	8.553.688	13.157.233	14.119.796	15.519.266	0,65	0,68	0,55
13	HEXA	Hexindo Adiperkasa Tbk	1.395.736	1.741.151	2.792.930	858.555	1.003.049	1.226.286	345.549	374.815	612.660	2,48	2,68	2,00
14	IKAI	Intikramik Alamaseri Industry Tbk	238.491	204.231	245.658	472.063	429.724	438.111	208.061	339.686	342.992	2,27	1,27	1,28
15	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk	1.914.345	1.590.455	1.645.326	217.003	149.273	129.272	373.293	440.049	507.136	0,58	0,34	0,25
16	INTA	Intraco Penta Tbk	606.510	710.996	1.120.472	521.270	558.138	808.595	310.576	305.680	328.623	1,68	1,83	2,46
17	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	125.853	131.285	190.057	617.095	678.743	718.864	(353.602)	(388.604)	(418.519)	-1,75	-1,75	-1,72
18	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk	340.210	432.808	732.703	10.337	48.176	129.572	179.048	220.614	269.771	0,06	0,22	0,48
19	KICI	Kedang Indah Can Tbk	75.092	64.064	93.195	81.629	17.424	20.322	58.585	62.838	65.896	1,39	0,28	0,31
20	KONI	Perdana Bangun Pusaka Tbk	58.720	53.771	50.853	45.337	43.508	36.950	20.892	19.416	16.608	2,17	2,24	2,22
21	LION	Lion Metal Works Tbk	143.272	179.568	229.607	37.917	46.260	51.934	149.773	169.870	201.208	0,25	0,27	0,26
22	LMPI	Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd Tbk	270.682	303.167	326.183	130.927	141.419	167.168	377.938	390.338	392.910	0,35	0,36	0,43
23	LMSH	Lion Mesh Prima Tbk	79.343	117.237	163.317	20.101	33.671	24.090	23.487	29.141	37.898	0,86	1,16	0,64
24	LTL	Lautan Lues Tbk	2.413.259	2.712.536	4.458.094	1.233.125	1.444.343	2.540.568	506.603	596.140	799.390	2,43	2,42	3,18
25	MYRX	Hanson International Tbk	391.856	288.196	-	442.812	435.486	162.355	226.458	89.292	(160.123)	1,96	4,88	-1,01
26	NIPS	Nipres Tbk	260.153	405.749	480.458	131.294	198.947	201.690	88.934	91.299	123.318	1,48	2,18	1,64
27	PYFA	Pyridam Farma Tbk	61.337	86.643	119.581	17.927	28.213	29.402	65.201	66.944	69.253	0,27	0,42	0,42
28	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo (d/h Sorini Corporation) Tbk	806.580	1.042.452	1.493.211	258.060	364.690	516.717	357.582	441.320	543.759	0,72	0,83	0,95
29	STIP	Siantar TOP Tbk	555.208	600.330	624.401	124.466	158.828	263.313	343.026	358.620	363.437	0,36	0,44	0,72
30	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk	1.193.999	1.844.207	3.955.846	1.183.409	1.518.219	1.908.928	864.441	934.960	888.773	1,37	1,62	2,15

NO	PERUSAHAAN	LABA BERSIH			PENDAPATAN			PROFITABILITAS			UKURAN DEWAN KOMISARIS		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	ENRG	263.396	115.638	(34.943)	1.459.460	1.137.543	1.859.071	0,18	0,10	-0,02	3	5	5
2	INCO	4.633.056	11.048.826	3.934.510	12.073.058	21.907.257	14.367.462	0,38	0,50	0,27	10	10	10
3	AKKU	120	(38)	(8.121)	22.354	23.062	8.079	0,01	0,00	-1,01	2	2	2
4	ALMI	83.211	31.726	4.567	1.969.677	2.321.871	2.376.798	0,04	0,01	0,00	5	5	5
5	APLI	66	(4.585)	(4.821)	161.450	192.974	300.786	0,00	-0,02	-0,02	3	3	3
6	BRAM	18.314	39.149	94.776	1.510.642	1.547.112	1.637.886	0,01	0,03	0,06	5	7	7
7	BRNA	(5.447)	10.380	20.764	306.652	375.941	479.934	-0,02	0,03	0,04	3	4	4
8	BTON	818	8.784	20.823	57.254	115.203	172.391	0,01	0,08	0,12	2	2	2
9	BUDI	20.678	46.177	32.981	1.072.908	1.350.298	1.551.987	0,02	0,03	0,02	3	3	3
10	DYNA	(6.678)	773	3	1.002.786	1.139.156	1.382.074	-0,01	0,00	0,00	4	4	4
11	ETWA	9.990	6.694	617.212	396.282	421.311	714.819	0,03	0,02	0,86	3	3	3
12	GGRM	1.007.822	1.443.585	1.880.492	26.339.297	27.389.365	30.251.643	0,04	0,05	0,06	5	5	5
13	HEXA	39.428	56.623	255.485	1.395.736	1.741.151	2.792.930	0,03	0,03	0,09	3	3	3
14	IKAI	2.763	12.257	3.306	238.491	204.231	245.658	0,01	0,06	0,01	2	2	2
15	IKBI	44.374	77.467	97.687	1.914.345	1.590.455	1.645.326	0,02	0,05	0,06	5	5	5
16	INTA	7.066	9.514	22.944	606.510	710.996	1.120.472	0,01	0,01	0,02	3	3	3
17	JKSW	5.563	(35.002)	(29.916)	125.853	131.285	190.057	0,04	-0,27	-0,16	2	2	2
18	JPRS	26.796	41.566	49.158	340.210	432.808	732.703	0,08	0,10	0,07	3	3	3
19	KICI	(14.819)	15.742	3.057	75.092	64.064	93.195	-0,20	0,25	0,03	3	3	3
20	KONI	(830)	(1.476)	(2.808)	58.720	53.771	50.853	-0,01	-0,03	-0,06	3	3	3
21	LION	20.642	25.298	37.840	143.272	179.568	229.607	0,14	0,14	0,16	3	3	3
22	LMP1	3.313	12.400	2.572	270.682	303.167	326.183	0,01	0,04	0,01	3	3	3
23	LMSH	2.667	5.942	9.237	79.343	117.237	163.317	0,03	0,05	0,06	3	3	3
24	LTL-S	29.677	71.670	145.846	2.413.259	2.712.536	4.458.094	0,01	0,03	0,03	3	4	5
25	MYRX	(92.107)	(137.166)	(251.076)	391.856	288.196	-	-0,24	-0,48	0,00	3	3	3
26	NIPS	7.650	5.085	1.551	260.153	405.749	480.458	0,03	0,01	0,00	3	3	3
27	PYFA	1.729	1.743	2.309	61.337	86.643	119.581	0,03	0,02	0,02	3	3	3
28	SOBI	27.784	94.185	142.496	806.580	1.042.452	1.493.211	0,03	0,09	0,10	3	3	3
29	STTP	14.426	15.595	4.816	555.208	600.330	694.401	0,03	0,03	0,01	2	2	3
30	TBLA	52.884	97.227	63.337	1.193.999	1.844.207	3.955.846	0,04	0,05	0,02	3	3	3

NO	PERUSAHAAN	KEPEMILIKAN MANAJEMEN (%)			TARIK	UMUR PERUSAHAAN			KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK (%)			PENGUNGKAPAN CSR		
		2006	2007	2008		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	ENRG	4,71	1,72	1,05	2004	2	3	4	33,18	34,95	46,25	0,3974	0,4744	0,4744
2	INCO	0,04	0,03	0,15	1990	16	17	18	17,89	17,9	17,92	0,4359	0,4359	0,4359
3	AKKU	0,65	0,65	0,65	2004	2	3	4	34,78	27,79	34,78	0,1410	0,2308	0,2564
4	ALMI	1,62	1,62	1,62	1997	9	10	11	17,31	17,42	17,42	0,1282	0,1667	0,1923
5	APLI	15,37	15,37	15,37	2000	6	7	8	38,2	38,2	38,2	0,1538	0,1923	0,2308
6	BRAM	17,31	23,52	25,4	1990	16	17	18	32,18	19,58	8,78	0,0769	0,2179	0,1538
7	BRNA	10,51	10,51	10,51	1989	17	18	19	25,24	25,24	25,24	0,2564	0,2436	0,1923
8	BTON	9,58	9,58	9,58	2001	5	6	7	10,55	10,55	10,55	0,1026	0,1410	0,1667
9	BUDI	0,94	9,62	0,94	1995	11	12	13	37,2	31,56	31,58	0,1410	0,3846	0,3205
10	DYNA	0,48	0,69	0,69	1991	15	16	17	27,64	22,49	28,27	0,1410	0,2179	0,2821
11	ETWA	0,06	0,06	0,06	1997	9	10	11	25,93	25,93	25,93	0,1154	0,2436	0,1667
12	GCRM	2,06	2,06	2,06	1990	16	17	18	25,82	25,82	25,82	0,0897	0,1538	0,1282
13	HEXA	0,01	0,01	0,01	1995	11	12	13	18,71	23,78	21,33	0,2179	0,2436	0,1538
14	IKAI	5,33	3,67	3,67	1997	9	10	11	22,23	15,29	15,59	0,0897	0,0769	0,1154
15	IKBI	0,09	0,09	0,09	1991	15	16	17	6,85	6,85	6,85	0,1154	0,1795	0,1026
16	INTA	1,33	1,33	2,71	1993	13	14	15	9,57	9,57	9,56	0,1282	0,1410	0,1410
17	JKSW	1,33	1,33	1,33	1997	9	10	11	39,44	39,44	39,44	0,0897	0,1795	0,1154
18	JPRS	2,2	2,2	2,2	1989	17	18	19	16,85	10,56	16,85	0,1282	0,1154	0,0897
19	KICI	4,6	4,6	4,6	1993	13	14	15	20,38	20,38	20,38	0,0769	0,1026	0,0641
20	KONI	5,58	5,58	5,58	1995	11	12	13	30,26	30,26	30,26	0,1282	0,0897	0,0769
21	LION	0,18	0,18	0,18	1993	13	14	15	42,12	42,12	42,12	0,0641	0,2179	0,1154
22	LMP	0,02	0,02	0,02	1994	12	13	14	22,45	22,45	22,45	0,0897	0,2436	0,0897
23	LMSH	25,61	25,58	25,58	1990	16	17	18	36,77	42,2	42,22	0,0897	0,2051	0,0513
24	LTL	3,64	3,64	3,64	1997	9	10	11	33,33	33,33	33,33	0,2179	0,2051	0,2051
25	MYRX	0,52	0,52	0,52	1990	16	17	18	97,97	97,97	97,97	0,0769	0,0641	0,0641
26	NIPS	12,4	12,4	12,4	1991	15	16	17	44,54	44,54	44,54	0,0769	0,0897	0,1282
27	PYEA	23,08	23,08	23,08	2001	5	6	7	23,07	23,07	23,07	0,1026	0,1538	0,1538
28	SOBI	0,05	0,05	0,04	1992	14	15	16	35,33	35,33	30,05	0,2179	0,2692	0,2692
29	STTP	6,28	6,51	6,5	1996	10	11	12	27,58	27,39	27,1	0,1282	0,2179	0,2308
30	TBLA	0,1	0,1	0,1	2000	6	7	8	21,7	40,33	42,55	0,2179	0,2436	0,2436

Lampiran V: Hasil Uji SPSS

Statistik Deskriptif Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	90	9,00	17,23	13,2103	1,61902
Leverage	90	-1,75	2,90	,9949	,90717
Profitabilitas	90	-,16	,10	,0252	,03313
Ukuran Dewan Komisaris	90	2,00	10,00	3,5111	1,62318
Kepemilikan Manajemen	90	,02	9,58	2,6178	2,33014
Umur Perusahaan	90	2,00	19,00	12,2667	4,45905
Kepemilikan Publik	90	6,85	97,97	29,0418	16,51293
Pengungkapan CSR	90	,05	,47	,1780	,09755
Valid N (listwise)	90				

1. Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Ukuran Perusahaan	Ukuran Leverage	Ukuran Profitabilitas	Ukuran Dewan Komisaris	Ukuran Kepemilikan Manajemen	Ukuran Umur Perusahaan	Ukuran Kepemilikan Publik	Ukuran Pengungkapan CSR
N	90	90	90	90	90	90	90	90
Normal Parameter Mean	13,2103	,9949	,0252	3,5111	2,6178	12,2667	29,0418	,1780
Std. Deviation	1,61902	,90717	,03313	1,62318	2,33014	4,45905	16,51293	,09755
Most Extreme Differences	,070	,139	,140	,346	,132	,119	,130	,141
Positive	,070	,126	,140	,346	,132	,077	,130	,141
Negative	-,047	-,139	-,134	-,188	-,132	-,119	-,089	-,110
Kolmogorov-Smirnov Z	,666	1,320	1,328	1,325	1,257	1,128	1,229	1,342
Asymp. Sig. (2-tailed)	,767	,061	,059	,069	,085	,157	,098	,055

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Ukuran Perusahaan	,840	1,190
Leverage	,988	1,012
Profitabilitas	,908	1,101
Ukuran Dewan Komisaris	,723	1,383
Kepemilikan Manajemen	,882	1,134
Umur Perusahaan	,760	1,317
Kepemilikan Publik	,819	1,221

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

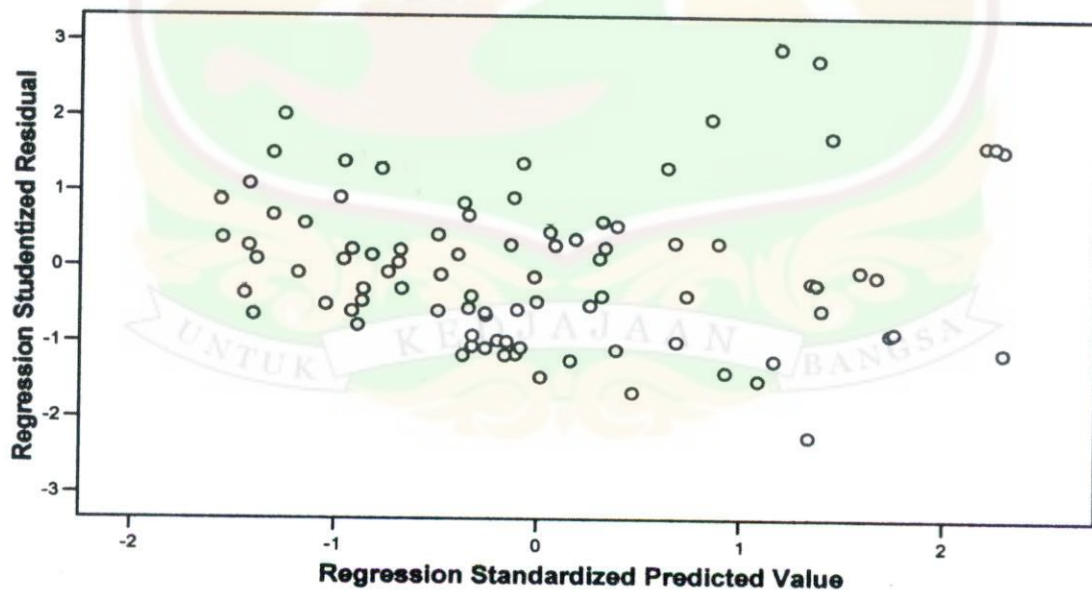
Model	Durbin-Watson
1	1,394 ^a

- a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Publik, Umur Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajemen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris
- b. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Hasil Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Pengungkapan CSR



2. Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,608 ^a	,369	,315	,08071

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Publik, Umur Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajemen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris

Hasil Uji Hipotesis F (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,313	7	,045	6,859	,000 ^a
	Residual	,534	82	,007		
	Total	,847	89			

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Publik, Umur Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajemen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Hasil Uji Hipotesis t (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,035	,090		-,389	,698
	Ukuran Perusahaan	,019	,006	,313	3,268	,002
	Leverage	,023	,009	,214	2,422	,018
	Profitabilitas	,180	,271	,061	,666	,508
	Ukuran Dewan Komisaris	,014	,006	,235	2,274	,026
	Kepemilikan Manajemen	-,009	,004	-,208	-2,230	,029
	Umur Perusahaan	-,008	,002	-,377	-3,748	,000
	Kepemilikan Publik	,000	,001	,065	,673	,503

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR